

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
(PPK) DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT**

(Suatu Studi Di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

Disusun Oleh:

DIAN ARDYANI

NIM. 0210313012-31



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH

MALANG

2006



ABSTRAKSI

Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)

Oleh : Dian Ardyani
Nim. 0210313012-31 (92 Hal)

Permasalahan yang selalu membayangi pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah masih tingginya angka kemiskinan. Sebagai upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemerintah memandang perlu meningkatkan bantuan pembangunan kepada masyarakat desa melalui pengelolaan di tingkat kecamatan yaitu Bantuan Program pengembangan Kecamatan (PPK).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan PPK dan untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan PPK serta untuk mengetahui faktor pendukung maupun penghambat yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan PPK di desa Pandanwangi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan dengan cermat dan akurat sesuai dengan kenyataan yang ada secara sistematis, dengan mengambil situs penelitian di Desa Pandanwangi, tempat kegiatan PPK untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, peneliti mengambil data dari pelaku PPK serta dari arsip dan dokumen yang ada di tempat penelitian. Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan langkah selanjutnya adalah menyajikannya, kemudian di analisis dan di interpretasikan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa pelaksanaan PPK di Desa Pandanwangi telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada mulai dari sosialisasi PPK pada masyarakat, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan pelestarian berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam kegiatan yang berhasil dijalankan diantaranya kegiatan sarana pendidikan yaitu pembangunan gedung TPQ dan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan. Namun demikian dalam pelaksanaan PPK tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung antara lain: partisipasi masyarakat, adanya kerjasama dengan pemerintah desa dengan masyarakat, kelancaran pengembalian dana simpan pinjam, kemudahan memperoleh bahan bangunan dan adanya transparansi dari pelaku PPK. Faktor penghambat antara lain: sulitnya

mendapatkan dana swadaya dari masyarakat yang akhirnya diambilkan dari kas desa, adanya keterlambatan dalam pencairan dana.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PPK di Desa Pandanwangi sudah berjalan cukup baik dengan partisipasi dari masyarakat dalam pemanfaatan hasil pelaksanaan PPK untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Saran yang dapat peneliti kemukakan adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai pencairan dana dan penggalan dana dari masyarakat, meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang baik dari pelaku PPK, aparat desa dan masyarakat.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, karena hanya rahmat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu kewajiban bagi setiap mahasiswa untuk memenuhi tugas-tugas dan syarat-syarat akhir akademis di Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya Malang Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya jurusan Administrasi Publik. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul : “PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ”

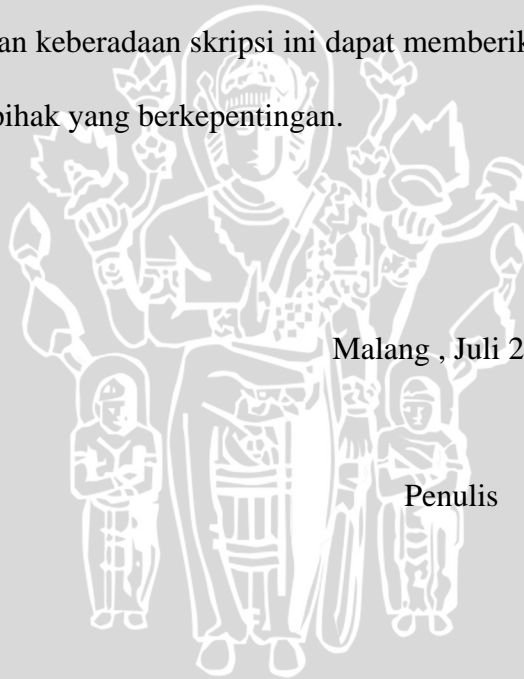
Selanjutnya penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, dan bimbingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain kepada :

1. Bapak Dr. Suhadak, M. Ec , selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Publik.
2. Bapak Drs. Irwan Noor, MA , selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik, staf-staf dan bagian pengajaran serta Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Unibraw.
3. Bapak Drs. Moch. Makmur, MS dan Andy Fefta Wijaya, Ph.D , selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan saran perbaikan kepada penulis dalam menyusun skripsi sehingga penulis dapat mewujudkan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Prayitno , selaku Kepala Desa Pandanwangi, seluruh Perangkat Desa serta para pelaku PPK Desa Pandanwangi atas keramahan dan informasi serta data-data yang diberikan kepada penulis.
5. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan yang telah diberikan, Amin.

Akhir kata semoga dengan keberadaan skripsi ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.



Malang , Juli 2006

Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Administrasi Pemerintahan daerah	9
B. Program Pengembangan Kecamatan (PPK).....	11
1. Pengertian Program.....	11
2. Pengertian PPK	14
3. Tujuan PPK	15
4. Sasaran PPK	18
5. Prinsip PPK.....	19
6. Organisasi Pelaksana PPK	22
7. Pelaksanaan PPK.....	25
C. Kemiskinan	28
1. Pengertian Kemiskinan.....	28
2. Jenis dan Penyebab Kemiskinan	30
3. Upaya Pengentasan Kemiskinan	32
D. Kesejahteran Masyarakat	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Fokus Penelitian.....	38

C. Situs Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	39
E. Pengumpulan Data	40
F. Instrumen Penelitian	40
G. Analisis Data	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Kondisi Geografis	43
2. Kondisi Demografi.....	44
3. Kondisi Pemerintahan	47
B. Data Fokus Penelitian	50
1. Pelaksanaan PPK di Desa Pandanwangi.....	50
a. Persiapan	50
b. Perencanaan.....	53
c. Pelaksanaan Kegiatan.....	59
d. Pengendalian	68
e. Pelestarian	70
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan PPK di Desa Pandanwangi	73
C. Analisa dan Interpretasi Data	75
1. Pelaksanaan PPK di Desa Pandanwangi.....	75
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan PPK di Desa Pandanwangi	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

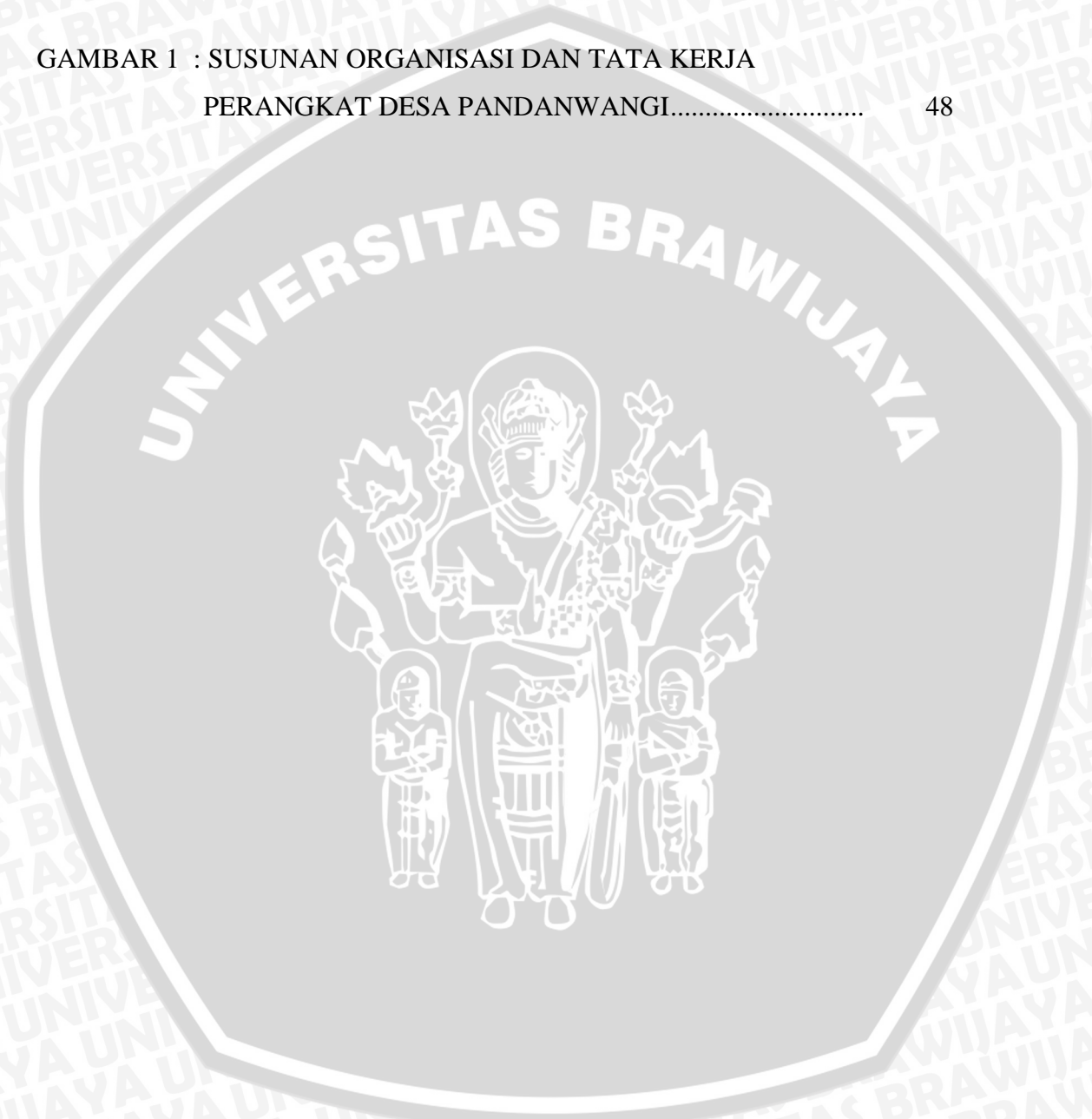
DAFTAR TABEL

TABEL 1 : LUAS WILAYAH DESA MENURUT PENGGUNAAANNYA	44
TABEL 2 : JUMLAH PENDUDUK DIRINCI MENURUT KELOMPOK USIA DAN JENIS KELAMIN.....	45
TABEL 3 : JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DESA PANDANWANGI KEADAAN TAHUN 2005.....	46
TABEL 4 : JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN DESA PANDANWANGI KEADAAN TAHUN 2005.....	46
TABEL 5 : TINGKAT PENDIDIKAN APARAT DESA PANDANWANGI	49
TABEL 6 : DATA KEPENDUDUKAN DESA PANDANWANGI TAHUN 2005.....	52
TABEL 7 : DAFTAR USULAN KEGIATAN DESAYANG MENERIMADANA BANTUAN PPK TAHUN ANGGARAN 2005-2006	57
TABEL 8 : PROSES PENCAIRAN DANA PPK DESA PANDANWANGI TAHUN ANGGARAN 2005/2006	60
TABEL 9 : REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA PPK DESA PANDANWANGI TAHUN ANGGARAN 2005/2006.....	60
TABEL 10 : ALUR PELAPORAN JALUR FUNGSIONAL	70

DAFTAR GAMBAR

**GAMBAR 1 : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DESA PANDANWANGI.....**

48



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : STRUKTUR LPMD DESA PANDANWANGI
- LAMPIRAN 2 : STRUKTUR BPD DESA PANDANWANGI
- LAMPIRAN 3 : DAFTAR RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMBANGUNAN GEDUNG TPQ
- LAMPIRAN 4 : DAFTAR RENCANA ANGGARAN BIAYA KEGIATAN
SIMPAN PINJAM
- LAMPIRAN 5 : DAFTAR RENCANA PENGEMBALIAN KREDIT
- LAMPIRAN 6 : KARTU PEMBAYARAN BUNGA DAN ANGSURAN
SIMPAN PINJAM
- LAMPIRAN 7 : DAFTAR PEMANFAAT MENURUT RENCANA
ANGSURAN KREDIT
- LAMPIRAN 8 : PETA WILAYAH DESA PANDANWANGI
- LAMPIRAN 9 : PEDOMAN WAWANCARA
- LAMPIRAN 10: SURAT KETERANGAN PENELITIAN
- LAMPIRAN 11: CURRICULUM VITAE



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan yang selalu membayangi pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah masih tingginya angka kemiskinan. Sekalipun usaha pembangunan telah membawa hasil-hasil yang melegakan namun kemiskinan sebagai masalah yang mendasar yang belum terpecahkan (Umar Juoro, 1985: 3). Perkembangan perekonomian dunia yang tidak merata telah menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik baik antar negara, antar daerah maupun antar kelompok masyarakat.

Harus disadari bahwa upaya pengentasan kemiskinan pada hakekatnya untuk membangun keberadaan penduduk miskin agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian syarat utama yang harus dipenuhi dalam pengentasan kemiskinan adalah peran serta aktif penduduk miskin dalam melaksanakan suatu bentuk usaha secara berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat haruslah ditujukan untuk membangun kehidupan masyarakat yang bermartabat, berkualitas secara berkelanjutan, antara lain menyangkut akses penduduk khususnya

penduduk miskin. sedangkan untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan potensi masyarakat, maka realitas kehidupan berbudaya dan beragama masyarakat Indonesia perlu diberdayakan dan didukung sehingga menjadi lebih produktif dalam mewujudkan kesejahteraan lahir batin, termasuk untuk mengurangi kemiskinan agar tidak menjadi rawan untuk diprovokasi berbagai kepentingan kelompok yang dapat menimbulkan konflik.

(<http://www.google.com>)

Sebagai upaya mempercepat penganggulangan kemiskinan, pemerintah memandang perlu meningkatkan bantuan pembangunan kepada masyarakat desa melalui pengelolaan di tingkat kecamatan yaitu Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Dalam rangka mendukung lebih lanjut pelaksanaan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan yang kemudian disebut Program Pengembangan Kecamatan / PPK yang berlangsung pada tahun 1998 hingga sekarang, khususnya untuk meningkatkan keterpaduan pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana pedesaan dengan cakupan lebih luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan.

Sejalan dengan otonomi daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, maka terdapat perubahan mendasar dalam paradigma pembangunan daerah, karena adanya pendelegasian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, maka PPK

dikembangkan sebagai media pembangunan kesadaran kritis terhadap perubahan paradigma pembangunan, media pembelajaran dan pengembangan kapasitas para pelaku pembangunan dan media aktualisasi prakarsa masyarakat dalam sebuah kegiatan pembangunan bersama.

Berpijak atas pemikiran ini, maka PPK yang dilaksanakan sejak Tahun 1998-2004 akan dikembangkan melalui Program Pengembangan Kecamatan Fase III (PPK-III) 2005-2006. Bersamaan dengan meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah maka dalam PPK-III akan dikembangkan bentuk tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pembiayaan PPK-III (cost sharing). Dalam pelaksanaan cost sharing tersebut, komitmen dari DPRD (legeslatif) bersama dengan pemerintah daerah (eksekutif) memiliki peran penting dalam PPK-III ini. Diharapkan akan semakin banyak pula mekanisme PPK diterapkan dan diadopsi untuk program-program pembangunan lainnya di daerah, khususnya program penanggulangan kemiskinan.

Dana Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) diperoleh dari dana hibah yang disalurkan kepada desa melalui kecamatan. Dana bantuan tersebut digunakan untuk mengembangkan kegiatan usaha produktif dan pembangunan sarana prasarana yang mendukung langsung kegiatan sosial ekonomi masyarakat pedesaan.

Jenis kegiatan yang akan dijalankan tersebut ditetapkan berdasarkan musyawarah di tingkat desa melalui wadah LPMD, dan disetujui pembiayaannya oleh Lembaga Musyawarah di Kecamatan yang terdiri dari Camat, Kepala Desa, Ketua I LPMD, Instansi Teknis terkait dan tokoh masyarakat melalui Forum UDKP (Unit Daerah Kerja Pembangunan).

Pelaksanaan PPK Desa Pandanwangi dimulai tanggal 5 Oktober 2005 sampai 28 Februari 2006 berjalan hampir 5 bulan. Dalam pelaksanaannya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) memerlukan proses sosialisasi baik dari pihak masyarakat sendiri maupun dari pihak pemerintah desa. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelestariannya, dengan menerapkan pendekatan partisipatif dan padat karya, sehingga makin banyak masyarakat memperoleh manfaat dalam hal pengalaman, ketrampilan dan pendapatan.

Sehubungan dengan uraian tersebut, penelitian ini akan mengambil lokasi di Desa Pandanwangi, Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, dengan pertimbangan bahwa desa tersebut sesuai dengan substansi penelitian. Dimana dilihat dari jumlah penduduk miskin di Desa Pandanwangi berjumlah 301 Kepala Keluarga dari jumlah keseluruhan Kepala Keluarga yakni 722 Kepala Keluarga. Dilihat dari jumlah penduduk miskinnya maka masyarakat Desa Pandanwangi masih tergolong dalam kategori miskin. Hal ini dilihat dari rendahnya kapasitas masyarakat dalam mengelola sumberdaya pembangunan sehingga produktivitas

masyarakat tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan kesejahteraan masyarakat disamping itu juga masih rendahnya kualitas pendidikan.

Apabila dilihat dari kualitas pendidikan sebagian besar penduduk Desa Pandanwangi adalah lulusan sekolah dasar (SD) yaitu sebanyak 325 orang, dan tidak/belum sekolah sebanyak 215 orang dari total keseluruhan jumlah penduduk sebanyak 2679 jiwa, jadi bisa dilihat pengetahuan mereka dalam hal pendidikan dan masalah kesehatan masih kurang memadai. Sedangkan untuk pelayanan sarana dan prasarana ekonomi desa Pandanwangi dinilai masih kurang, seperti belum tersedianya pasar desa bagi warga desa Pandanwangi dalam melakukan aktivitas perekonomiannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat tema penelitian kedalam skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Sebagaimana dikatakan diatas bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah serius yang harus segera ditangani. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah diluncurkan oleh pemerintah, namun kemiskinan masih saja

masalah kemiskinan belum dapat dituntaskan. Dengan dikeluarkannya Program Pengembangan Kecamatan (PPK), maka diharapkan akan tercipta masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta tercapainya pemerataan pembangunan.

Sejalan dengan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapatlah dirumuskan permasalahannya yaitu “Bagaimana Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Suatu studi di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)?” dan secara terperinci dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban ?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan - tujuan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pandanwangi Kec. Soko-Kab. Tuban.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PPK dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pandanwangi Kec. Soko – Kab. Tuban.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Sebagai masukan kepada pemerintah Desa Pandanwangi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan PPK di masa yang akan datang.
2. Sebagai bahan acuan pertimbangan untuk penelitian serupa dimasa mendatang dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi guna penelitian selanjutnya.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami tulisan ini, maka penulis memberikan gambaran secara umum tentang isi penelitian ini. Secara garis besar penulis membagi dalam lima (5) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kontribusi penelitian serta sistematika pembahasannya.

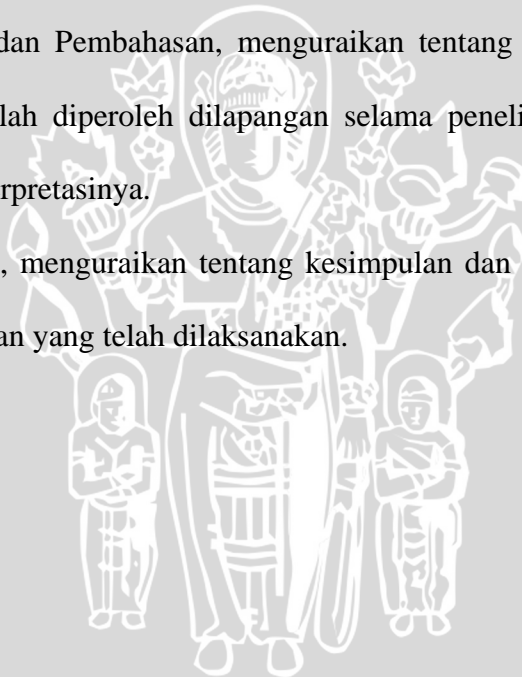
BAB II : Kajian pustaka, menguraikan teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu pelaksanaan PPK di Desa Pandanwangi

Kecamatan Soko Kabupaten Tuban sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PPK serta menguraikan tentang pengertian kemiskinan, jenis dan penyebab kemiskinan, upaya pengentasan kemiskinan

BAB III : Metode penelitian, menguraikan tentang jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian, situs penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian serta analisa data yang digunakan.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan, menguraikan tentang data-data penelitian yang telah diperoleh dilapangan selama penelitian dengan analisa dan interpretasinya.

BAB V : Penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan terhadap saran hasil penelitian yang telah dilaksanakan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH

Secara konseptual administrasi merupakan sarana untuk menciptakan suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha kelompok. Sebagai konsep administrasi adalah *Universal Application*. Administrasi ada kesamaan dengan munculnya *Human Race* dan akan terus terpakai selama umat manusia itu masih hidup. (Zauhar, 1996:6)

Seperti yang telah dijelaskan diatas mengenai administrasi, maka sampailah pada pengertian istilah Administrasi Pemerintahan berasal dari istilah *Administration* (Inggris) atau *Bestuur Administrasi* (Belanda) yang dapat diartikan sebagai berikut : “Segala fungsi pengendalian administrasi oleh badan-badan atau instansi pemerintahan dari semua atau jenis guna melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuanpemerintahan sesuai dengan wewenang masing-masing sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan dan peraturan-peraturan lainnya.”

Bertitik tolak dari pengertian adminisitrasi yang dimaksud diatas, maka dapat dirumuskan pengertian “Administrasi Pemerintahan Daerah “ adalah rangkaian kegiatan penataan usaha kerjasama sekelompok orang (aparatur daerah)

untuk mencapai tujuan pemerintahan daerah. Kegiatan penataan yang dilakukan terhadap usaha kerja sama tersebut di wujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah, yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip ilmu administrasi. Dengan demikian yang dipelajari dalam administrasi pemerintahan daerah meliputi struktur organisasi, personil (aparatur daerah), pembagian tugas dan wewenang, keuangan daerah dan sebagainya.” (Victor Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 1994:11-12)

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa yang disebut dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah, yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.

Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya telah menjatuhkan pilihannya pada asas desentralisasi, seperti terlihat dalam ketentuan pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya. Terkait dengan prinsip Negara Kesatuan yang dianut, maka Negara Republik Indonesia mewujudkan diri sebagai negara kesatuan yang didesentralisasikan.

Sebagai konsekuensi dianutnya sistem atau asas ini, dibentuklah unit-unit pemerintahan setempat yang disebut Daerah Otonom, yakni daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi rumah tangganya sendiri atas

dasar kebijaksanaan, inisiatif, pembiayaan dan dilakukan oleh perangkat daerah sendiri.

Pembentukan daerah otonom tidak terlepas dari beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti yang dikemukakan oleh Irwan Soejito (1981:42) sebagai berikut :

“ Daerah yang dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan dan keamanan dan syarat-syarat lain yang memungkinkan melaksanakan pembangunan, pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.”

Sebagaimana dikatakan oleh Kansil dan Cristine (2002 : 9) bahwa :

“ Sesuai dengan tujuan pemberian otonomi kepada daerah yang berorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan.” Maka program PPK ini sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah yaitu pelaksanaan pembangunan dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta membantu mengentas masyarakat dari kemiskinan dengan memberikan dana bantuan PPK.

B. PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)

1. Pengertian Program

Suatu program meliputi serangkaian kegiatan yang relatif luas. Program menunjukkan (1) langkah-langkah pokok yang diperlukan untuk mencapai

tujuan, (2) satuan atau para anggota organisasi yang bertanggungjawab atas setiap langkah, dan (3) urutan dan waktu setiap langkah. Program dapat disertai suatu anggaran atau sekumpulan anggaran bagi kegiatan-kegiatan yang diperlukan. (Handoko, 1984: 88).

Menurut definisi yang dikemukakan oleh *United Nation* (1971) yang dikutip oleh Zauhar (1993:2), kata “program” diartikan sebagai: *“program is taken to mean a form of organized social activity with a specific objective, limited in space and time. It often consist of an interrelated group of project an usually limited to one or more on going organization and activities.”*

Adapun langkah-langkah siklus/program dan proyek menurut Zauhar (1993: 19), meliputi:

(a) Perencanaan.

Kegiatan ini dimulai dengan konseptualisasi dan identifikasi. Hal ini dilakukan agar diperoleh informasi yang membantu untuk menetapkan bidang-bidang kegiatan program dan proyek yang akan dilakukan dan nantinya merupakan kegiatan yang logis dan penting. Hal tersebut menurut Zauhar dapat dilihat dari efisiensi penggunaan tenaga biaya dan waktu (1993:5).

Pada tahap ini kemudian dilakukan studi kelayakan dalam tingkat membantu dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan pada saat yang

tepat dapat dipergunakan untuk memulai program-program perbaikan.

Menurut Zauhar (1993:5) kelayakan ini harus membuat informasi serta analisis yang berkaitan dengan:

1. Segi ekonomi dari seluruh proyek.
2. Segi keuangan seluruh proyek terutama sumber pembiayaannya.
3. Segi teknis seluruh proyek, khususnya dalam pelaksanaan dan pengoprasian proyek.
4. Dampak politik seluruh proyek yang sering merupakan pertimbangan yang dominan memproyeksikan seluruh kegiatan.
5. Segi manajemen seluruh proyek dalam arti tersedianya tenaga pimpinan yang bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan proyek dan,
6. Desain sementara seluruh proyek.

Setelah selesai kemudian dilanjutkan dengan tahap desain dimana akan tergambar perincian yang lebih detail dan cermat yang meliputi daftar khusus catatan kegiatan, penjadwalan sumber daya, bidang kerja, usaha dan administrasi kepemimpinan/koordinator.

(b) Implementasi Program

Pada implementasi diperlukan adanya koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait dengan program yang dimaksud dengan pelaku-pelaku yang ada didalamnya dan tertuju. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah SDA, bahan perlengkapan, tata kerja, sangat mendukung keberhasilan jalannya suatu program.

(c) Evaluasi dan Monitoring

Tjokroamidjojo (1990:204) mengatakan bahwa: “biasanya dilakukan melalui sistem pelaporan kemajuan (*progress reporting*), Review dan evaluasi serta hasil monitor untuk keperluan kebijaksanaan pengambilan keputusan, perencanaan kembali (*reformulate*) dan pelaksanaan kembali (*Re-implementasi*).

Dengan demikian hasil monitor dan evaluasi ini nantinya merupakan dasar untuk menilai keberhasilan program dan proyek serta sebagai bahan untuk mengadakan perubahan atau perluasan rencana kerja bila hal ini diperlukan.

2. Pengertian PPK

Di Indonesia banyak dikeluarkan program kebijakan seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang merupakan salah satu jenis program untuk mengentaskan kemiskinan.

PPK merupakan suatu bentuk program pemerintah dalam upaya mendukung program penanggulangan kemiskinan melalui Inpres No. 5 tahun 1995 tentang peningkatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1993. Program ini merupakan upaya lanjutan Inpres No. 5 tahun 1993 tentang Desa Tertinggal (IDT). PPK ini dirancang secara

khusus untuk meningkatkan keterpaduan pengembangan usaha produktif dan pembangunan sarana prasarana pedesaan.

Program ini bersifat lintas sektoral dan saling mendukung dengan program lain, dimana dalam pelaksanaan melibatkan berbagai instansi pemerintahan dan masyarakat serta memerlukan keserasian dan keterpaduan langkah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PPK adalah integrasi dan sinkronisasi dari program-program sebelumnya yakni antara kegiatan bantuan pembangunan prasarana / sarana dengan kegiatan pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif secara selaras dan berkesinambungan (saling mendukung dengan program-program lainnya) sehingga masyarakat semakin dapat diberdayakan dalam upaya meningkatkan taraf kehidupannya.

3. Tujuan PPK

Adapun tujuan dari pelaksanaan PPK berdasarkan pada Petunjuk Teknis Operasional PPK (2002:1-2) yaitu:

a. Tujuan Umum

Secara umum tujuan PPK adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam menyelenggarakan pembangunan desa dan atau antar desa serta

peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Tujuan Khusus

Sedangkan tujuan khusus PPK adalah:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian.

Dijelaskan oleh Ndraha (1990) dalam bukunya Agus Suryono (2001:125) bahwa: “Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana). Perasaan terlibat dalam perencanaan pembangunan perlu ditumbuhkan sedini mungkin dalam masyarakat. Partisipasi ini disebut juga sebagai partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan politik yang menyangkut nasib mereka, dan partisipasi dalam hal yang bersifat teknis.”

- 2) Meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Menurut Mufidah (1986:23), “Upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia dalam pembangunan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional, pemberdayaan perempuan

diberbagai bidang kehidupan mencerminkan kesetaraan hak, kewajiban, peranan dan kesempatan antara keduanya sesuai dengan falsafah dan budaya bangsa, diusahakan dengan senantiasa mengarah pada terwujudnya kesetaraan yang berkeadilan gender.” Sedangkan pengambilan keputusan menurut Ibnu Syamsi (1995:5) adalah “tindakan pimpinan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu diantara alternatif-alternatif yang memungkinkan.”

3) Mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal dalam pembangunan.

Dijelaskan oleh Hadi Prayitno (1987:5) bahwa, “Pada intinya basis bagi pelaksanaan pembangunan pedesaan meliputi dua dal. Pertama, sumber alam yang tersedia; dan Kedua, sumberdaya manusia yang akan memanfaatkan sumber alam tadi. Sumber alam memberikan basis ekonomi yang nantinya dapat diolah dan dikembangkan. Sumberdaya manusia tentunya akan mempengaruhi cara dan intensitas pemanfaatan sumber alam yang disediakan tadi.”

4) Mendorong sistem pelebagaan, sistem pembangunan partisipatoris.

Dalam model pembangunan, kelembagaan diartikan sebagai organisasi formal yang menghasilkan dan melindungi perubahan, jaringan dukungan yang dikembangkan dalam lingkungannya.(J.W.

Easton, 1986:23). Sedangkan pengertian partisipatoris menurut Lemhanas (1999:32) yaitu semua orang hendaknya dapat menyuarakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perantara yang legitimit yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi yang luas dengan didasarkan atas kebebasan bersuara dan berkumpul, juga atas kemampuan berpartisipasi secara konstruktif.”

- 5) Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan dan atau kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan hakekat pembangunan Nasional Indonesia. Pembangunan nasional mengandung makna peningkatan kesejahteraan materiil dan spiritual yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spiritual berdasarkan pancasila dalam wadah Negara Republik Indonesia.(Lemhanas, 1997:30).

4. Sasaran PPK

Berdasarkan tujuan itu maka sasaran utama PPK adalah kelompok penduduk miskin pedesaan pada kecamatan miskin. Kecamatan lokasi PPK ditentukan oleh Tim Koordinasi PPK Pusat dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah, dengan mempertimbangkan:

- a. Jumlah penduduk miskin.
- b. Peringkat kemiskinan.
- c. Indeks kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- d. Indeks kualitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi.

5. Prinsip PPK

Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang menganut azas Dari, Untuk dan Oleh Masyarakat (DOUM) mengandung prinsip-prinsip seperti yang dapat kita lihat dari Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai berikut:

- a. Keberpihakan kepada orang miskin

Orientasi setiap kegiatan yang dilaksanakan, baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil ditujukan bagi penduduk miskin. Keberpihakan ini sangat penting mengingat penanggulangan kemiskinan atau peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin merupakan tujuan utama dari PPK.

Menurut definisi World Bank (1990) dalam Agus Suryono (2001:112) “Kemiskinan adalah sebagai ketidakmampuan seorang individu memenuhi kebutuhan dasarnya. Konsep kemiskinan merupakan suatu masalah dalam pembangunan dengan ditandai oleh indikator adanya pengangguran dan

keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan dan kecemburuan sosial.”

b. Transparansi

Pengelolaan seluruh kegiatan PPK harus dilakukan secara transparan (terbuka) dan diketahui oleh masyarakat luas. Dengan transparansi maka segala sesuatu yang dilakukan akan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (*accountable*). Salah satu aspek penting dalam transparansi adalah kepercayaan dari para pelaku PPK bahwa transparansi akan sangat berpengaruh pada keberhasilan PPK.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. (Riant Nugroho, 2003:219)

c. Partisipasi

Pengertian partisipasi dalam PPK adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif terutama kelompok miskin dan perempuan dalam setiap tahap kegiatan PPK, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan kegiatan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Slamet (1980) dalam bukunya Agus Suryono (2001:124) diartikan sebagai ikut sertanya

masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

d. Desentralisasi

Dalam rangka mewujudkan desentralisasi PPK, maka pemerintah menyerahkan wewenang kepada masyarakat untuk:

- Memanfaatkan dan mengelola dana PPK
- Memperoleh hak pendampingan
- Merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhannya.
- Mempertanggung jawabkan pengelolaan dana PPK.
- Memelihara dan melestarikan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Menurut Kaho (1997:38), desentralisasi diartikan “ sebagai suatu sistem dalam mana bagian dari tugas-tugas negara diserahkan penyelenggaraannya kepada organisasi yang sedikit banyak mandiri (*independet*). Organisasi yang mandiri ini wajib atau berwenang melakukan tugas atas inisiatif dan menurut kebijaksanaannya sendiri.”

e. Kompetisi sehat

Setiap pengambilan keputusan penting dalam PPK dilakukan melalui musyawarah dan bersifat kompetisi secara sehat. Dengan sifat kompetisi

sehat, masyarakat berhak menentukan pilihannya sendiri berdasarkan hasil kajian atau telaahan terhadap berbagai alternatif pilihan untuk mendapatkan pilihan yang terbaik.

Tujuan dari kompetisi sehat adalah agar masyarakat ikut berperan aktif dalam menentukan pilihannya sendiri berdasarkan hasil kajian atau telaahan terhadap berbagai alternative pilihan untuk mendapatkan hasil yang paling dibutuhkan. (Buletin Internal Monitoring, edisi 10, Maret 2004).

6. Organisasi Pelaksana PPK

PPK merupakan salah satu program nasional yang bersifat lintas sektoral dengan susunan kelembagaan yang sudah ada dan melibatkan banyak pihak baik pemerintah maupun swasta. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan harapan dari program itu sendiri.

Wadah pelaksanaan PPK tersebut dibentuk dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Adapun wadah yang dimaksud terdiri dari Tim Koordinasi PPK Tingkat Pusat, Tim Koordinasi PPK Tingkat Propinsi, Tim Koordinasi PPK Tingkat Kabupaten, Tim Koordinasi PPK Tingkat Kecamatan dan di tingkat desa Kepala Desa bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan PPK.

Sedangkan susunan kelembagaan dari pelaksanaan PPK beserta tugas yang harus dilaksanakan seperti termuat dalam Petunjuk Teknis Operasional Bantuan PPK oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (2002: 9-12) disebutkan organisasi pelaku PPK itu terdiri dari:

a. Tingkat Nasional

Terdiri dari Tim Koordinasi PPK Tingkat Pusat dan Konsultan Manajemen Nasional yang berperan sebagai tim pembinaan teknis dan administrasi serta menjaga proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PPK secara nasional.

b. Tingkat Propinsi

Tim koordinasi dibentuk dengan Gubernur sebagai penanggung jawab keberhasilan PPK di wilayahnya dan Tim Koordinasi PPK Propinsi yang dibantu oleh sekretariat PPK Propinsi.

c. Tingkat Kabupaten

Tim koordinasi dibentuk dengan Bupati sebagai penanggung jawab keberhasilan PPK di wilayahnya dan dibantu oleh Tim koordinasi PPK Kabupaten dan Konsultan Manajemen Kabupaten.

d. Tingkat Kecamatan

- 1) Camat sebagai penanggung jawab keberhasilan pelaksanaan PPK.
- 2) Kasi PMK selaku PjOK bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan PPK dan menjalin koordinasi yang erat dengan fasilitator Kecamatan (FK) serta dengan pihak yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
- 3) Tim Verifikasi. Memasyarakat melalui forum UDKP menetapkan usulan kegiatan dan memantau kemajuan PPK di Kecamatan.
- 4) UPK (Unit Pengelolaan Kegiatan).

e. Tingkat Desa

- 1) Kepala Desa bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan PPK di wilayahnya.
- 2) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terdiri dari anggota masyarakat yang berperan untuk mengelola dan melaksanakan PPK.
- 3) Tim Penulis Usulan (TPU) berperan menyiapkan dan menyusun gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa.
- 4) Fasilitator Desa (FD) adalah seseorang yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam melaksanakan tahapan PPK di tingkat desa dan kelompok masyarakat pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan.

7. Pelaksanaan PPK

Pelaksanaan program adalah tahapan yang dimulai dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahap pelestarian. Tahap ini dimulai dengan penggalian gagasan di tingkat kelompok dan dusun. Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat. Rangkaian pelaksanaan program meliputi:

a. Persiapan.

Persiapan kegiatan meliputi sosialisasi bantuan PPK di tiap tingkat melalui penyuluhan, selebaran, lokakarya, seminar bahkan bias berupa pelatihan-pelatihan baik untuk aparat, fasilitator maupun masyarakat.

b. Perencanaan.

Perencanaan PPK dimulai dengan pemilihan kecamatan sasaran yang dilakukan melalui berbagai kegiatan yang dimulai dengan penggalian gagasan kelompok dan dusun, musyawarah khusus perempuan, musyawarah desa kedua, verifikasi, pembuatan dan pemeriksaan desain serta RAB, musyawarah antar desa ketiga, pengesahan alokasi bantuan oleh Camat dan yang terakhir pengesahan dokumen Surat Perjanjian Penetapan Bantuan (SPPB).

c. Pelaksanaan Kegiatan.

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan azas PPK, maka perlu adanya persiapan yang matang dan terencana. Persiapan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, seperti: masyarakat, Tim Pengelola Kegiatan dan seluruh pelaku PPK.

d. Pengendalian.

Pengendalian PPK dilakukan melalui pemantauan, pelaporan, pemeriksaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Strategi dasar dalam pengendalian PPK adalah:

- 1) Pelaku PPK disemua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan baik formal maupun informal dengan disiplin, akurat dan efektif termasuk jika ditemui kendala dan masalah.
- 2) Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan mampu memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan.
- 3) Harus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan.

- 4) Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan pada setiap tahapan yang dilaksanakan.
- 5) Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan aturan dengan pemberian sanksi.

e. Pelestarian.

Pelestarian kegiatan merupakan tahapan pasca pelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggung jawab masyarakat. Namun demikian dalam melakukan tahapan pelestarian, masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip-prinsip PPK.

Guna mendukung upaya pelestarian maka diperlukan beberapa komponen berikut:

- 1) Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial yang harus dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat, Tim Pengelola Kegiatan, serta pelaku-pelaku lain PPK di desa dan kecamatan.
- 2) Penyediaan sistem dan mekanisme monitoring, evaluasi, perencanaan pengendalian secara partisipatif yang memungkinkan anggota masyarakat dapat mengetahui serta ikut mengontrol kegiatan yang direncanakan, sedang berjalan maupun yang sudah selesai dilaksanakan.

- 3) Penguatan lembaga-lembaga masyarakat di kecamatan dan desa termasuk lembaga pengelola prasarana / sarana.

Pelestarian PPK diarahkan kepada pelestarian sistem dan kelembagaan serta pengembangan berbagai sarana dan prasarana yang ada, sehingga dapat secara terus-menerus dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif dan efisien.

C. KEMISKINAN

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi oleh setiap masyarakat. Masalah kemiskinan bukan hanya permasalahan setiap negara namun sudah merupakan permasalahan masyarakat dunia. Kemiskinan rasanya tidak pernah habis dibicarakan, sebab disitu ada si kaya maka disitu pula ada si miskin. Fenomena kemiskinan merupakan sebuah kenyataan yang cukup merisaukan mengingat upaya-upaya pembangunan yang terus kita lakukan, dimana perubahan yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan hidup masyarakat, ternyata masih memunculkan ketimpangan sosial yang berasal dari kemiskinan tersebut.

Untuk memahami kemiskinan maka kita terlebih dahulu memahami arti kemiskinan. Kemiskinan berasal dari kata “miskin” yang dalam kamus

Bahasa Lengkap Bahasa Indonesia (KLBI) artinya “...tidak mempunyai apa-apa (harta atau yang dimakan).” Sedangkan Parsudi Suparlan (1984:12) menyebutkan definisi dari kemiskinan sebagai berikut: “kemiskinan sebagai suatu standart tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standart kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”

Sementara itu World Bank (1990) yang telah dikutip kembali oleh Agus Suryono, (2001:112) juga menyebutkan definisi kemiskinan diartikan : “Sebagai ketidakmampuan seorang individu memenuhi kebutuhan dasarnya. Konsep kemiskinan merupakan suatu masalah dalam pembangunan ditandai dengan indikator adanya pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan dan kecemburuan sosial.”

Hal ini disebabkan karena masyarakat miskin memiliki kelemahan dalam manajemen usaha dan keterbatasan dalam mengakses peluang kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai kemampuan dan potensi yang lebih tinggi. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan yang serba kekurangan baik materi maupun non materi pada seorang individu ataupun kelompok masyarakat.

2. Jenis dan Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan sebagai suatu proses adalah merupakan pencerminan kegagalan dari sistem pada masyarakat dan negara dalam mengelola sumber daya dan dana secara adil kepada warga negaranya.

Menurut Agus Suryono (2001:112) kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni: Kemiskinan Absolut dan Kemiskinan Relatif.

“Seseorang atau sekelompok orang dikatakan miskin absolut apabila tingkat pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut

Sedangkan kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada garis kemiskinan warga yang lain (disuatu wilayah) dan kelompok masyarakat yang relatif kaya ditempat lain.”

Sedangkan menurut Chambers (1987) (dalam Agus Suryono,2001:113)

kemiskinan dianggap sebagai: “Proses interaksi dari berbagai faktor yang muncul sebagai akibat dari situasi ketidakadilan, ketidakpastian, ketimpangan, ketergantungan dalam struktur masyarakat. Oleh karena itu kemiskinan lebih tepat disebut sebagai *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan yang terdiri dari lima penyebab kemiskinan yang saling terkait yaitu: Ketidakberdayaan (*powerlessness*), kerawanan atau kerentanan (*vulnerability*), kelemahan fisik (*physical weakness*), kemiskinan (*poverty*), dan isolasi (*isolation*).”

Analisi lain disebutkan oleh Baswir (1999) (dalam Agus Suryono, 2001:113) yang menyebutkan jenis kemiskinan dan sekaligus faktor-faktor penyebab kemiskinan antara lain sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan Natural (situasional) adalah kemiskinan yang disebabkan karena faktor alamiah seperti cacat fisik atau karena bencana alam.
- 2) Kemiskinan Kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya seperti ketidak disiplin atau malas.
- 3) Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan yang disebabkan faktor buatan manusia seperti distribusi aset produktif yang tidak merata.

Untuk menegaskan pernyataan diatas, Dewanta (1995) (dalam Agus Suryono, 2001:113) mengidentifikasi beberapa penyebab orang menjadi miskin antara lain:

- a) Karena perbedaan akses ekonomi yang dimiliki;
- b) Ketidak beruntungan (lucky) yang dimiliki oleh kelompok masyarakat miskin;
- c) Ketimpangan distribusi;
- d) Pembangunan analog sebagai ideologi;
- e) Strategi pembangunan dan industrialisasi; dan
- f) Intervensi pemerintah (sebagai eksekutor pens).

Berdasarkan pada uraian diatas dapat dikatakan bahwa kemiskinan itu pada hakekatnya multidimensional dan langsung maupun tidak langsung terkait dengan sistem masyarakat secara menyeluruh dan bukan hanya ekonomi atau politik, sosial dan budaya. Sehingga penanganannya harus berlangsung secara menyeluruh dengan suatu strategi yang mendukung kaitan-kaitan seluruh aspek kehidupan.

3. Upaya Pengentasan Kemiskinan

Secara teoritis, upaya-upaya kebijaksanaan pengentasan kemiskinan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin diarahkan untuk:

- a. Memperluas posisi tawar dan memperkecil ketergantungan masyarakat miskin dari kelas sosial di atasnya dengan cara memperbesar kemungkinan masyarakat melakukan diversifikasi usaha,
- b. Memberikan bantuan permodalan kepada masyarakat miskin dengan bunga yang rendah dan berkelanjutan;
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk bisa terlibat untuk menikmati keuntungan dari hasil produknya dengan cara menerapkan kebijakan harga yang adil;
- d. Mengembangkan kemampuan masyarakat miskin agar memiliki ketrampilan dan keahlian untuk memberi nilai tambah pada produk dan hasil usahanya. (Agus Suryono, 2001:119).

Selanjutnya Usman dan Uphoff (Dewanta, 1995) menyebutkan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan yaitu:

- 1) Investasi pelayanan masyarakat dalam bidang infra struktur fisik dan sosial;
- 2) Kebijakan pemerintah yang menguntungkan masyarakat kecil;
- 3) Teknologi yang disediakan untuk kaum miskin sesuai kemampuannya; dan

- 4) Kelembagaan yang efektif yang mampu menumbuhkan sinergisme bekerja.

Untuk mengentas masyarakat dari kemiskinan di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai macam program pembangunan. Kita sudah sering mendengar program-program yang ditujukan bagi petani atau warga pedesaan yang miskin seperti: program PKT (Pengembangan Kawasan Terpadu), IDT, P2KP dan program lainnya. Namun pada kenyataannya masalah kemiskinan masih tetap ada di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah telah melaksanakan suatu program yang merupakan kelanjutan dari program IDT yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

D. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pembangunan kesejahteraan masyarakat untuk seluruh rakyat keberhasilannya ditentukan berbagai faktor dan bukan semata-mata karena ketersediaan dana. Lingkup permasalahan kesejahteraan dewasa ini semakin kompleks baik karena adanya faktor-faktor struktur penduduk, maupun faktor-faktor yang ditumbuhkan oleh intervensi dan inovasi pembangunan. Selanjutnya program kesejahteraan rakyat bukan semata-mata untuk mengatasi dampak dari adanya bencana alam, kerusuhan (konflik etnis/suku/agama), pelaksanaan otonomi daerah, masalah perbatasan dan disintegrasi. (<http://www.google.com>)

Pada dasarnya pembangunan kesejahteraan rakyat haruslah ditujukan untuk pembangunan kehidupan penduduk yang bermartabat, berkualitas secara berkelanjutan, antara lain menyangkut akses penduduk khususnya penduduk miskin terhadap pemenuhan hak dasar atas pangan, kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, air bersih, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan. ([http:// www.google.com](http://www.google.com))

Partisipasi masyarakat tidak saja dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan tapi juga dalam kesinambungan keadaan sejahtera tersebut, karena:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek jika merasa dilibatkan
3. Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan itu sendiri. (Conyers, 1991: 154)

Dalam pembangunan kesejahteraan rakyat, berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, tercermin dari membaiknya berbagai indikator kinerja seperti pendidikan, kesehatan dan pengendalian kelahiran, meskipun masih banyak lagi kondisi yang harus diperbaiki dan ditingkatkan.

Beberapa indikator menunjukkan masih rendahnya kesejahteraan rakyat serta faktor-faktor yang memperburuk kondisi kesejahteraan rakyat, dijelaskan dalam <http://www.google.com> tentang kesejahteraan masyarakat antara lain :

1. Tingkat pendapatan yang masih rendah
2. Pengangguran yang masih tinggi
3. Biaya hidup yang tinggi dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang semakin sulit dipenuhi oleh masyarakat lapisan bawah
4. Kurangnya penghayatan, pengamalan, pengembangan nilai keagamaan
5. Kurangnya pemahaman etos berkarya
6. Lambatnya pembangunan sumber daya manusia
7. Lemahnya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia termasuk aparatur negara
8. Lemahnya daya dorong perekonomian
9. Tingginya kesenjangan antar daerah
10. Menurunnya penyediaan infrastruktur
11. Lemahnya kelembagaan sosial baik formal maupun non formal
12. Menipisnya sumber daya alam dan menurunnya daya dukung lingkungan
13. Gangguan keamanan, konflik sosial, dan bencana alam serta kondisi perekonomian yang masih belum labil.

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu agenda prioritas dan menjadi salah satu kunci keberhasilan upaya pembangunan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Untuk itu perlu menjadi perhatian dari seluruh komponen bangsa agar melaksanakannya secara sungguh-sungguh guna kepentingan peningkatan kualitas dan kapasitas anak-anak dan generasi muda.

Usaha-usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat diatas harus melibatkan masyarakat itu sendiri dengan berbagai kemudahan yang

diselenggarakan oleh pemerintah dalam kebijakan-kebijakannya dalam mengentas masyarakat dari kemiskinan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kirk dan Muller mengatakan bahwa : “ Pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.” (Moleong, 1995:3)

Penelitian ini bertujuan menggambarkan pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Karena itu penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Suryabrata mengatakan bahwa : “ Penelitian Deskriptif bertujuan membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.” (Suryabrata, 1995:37). Dengan demikian dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan dengan cermat dan akurat sesuai dengan kenyataan yang ada secara sistematis.

Menurut Huasaini Usman dan Purnomo Setiady Abar (1996:5) Penelitian kasus dan penelitian lapangan (Case Study Reseach and Field Study Research)

bermaksud mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.

B. FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian adalah suatu hal yang dijadikan pusat perhatian dalam penelitian, sehingga peneliti dapat membatasi studi yang dilakukan sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian. Moleong mengatakan bahwa : “ Dengan menetapkan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah atau mana yang akan dibuang.”(Moleong, 1995:63). Karena itu fokus penelitian perlu dijabarkan dalam bentuk rincian fokus, agar terlihat jelas data yang akan dikumpulkan dan arah mana penelitian tersebut. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), meliputi :
 - a. Persiapan
 - b. Perencanaan
 - c. Pelaksanaan Kegiatan
 - d. Pengendalian
 - e. Pelestarian

2. Faktor pendukung dan penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan proyek PPK di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

C. SITUS PENELITIAN

Situs penelitian adalah tempat dimana sebenarnya peneliti dapat memperoleh atau menangkap keadaan atau fenomena dari obyek yang akan diteliti. dengan demikian yang menjadi situs dalam penelitian ini adalah :

1. Kantor Kepala Desa Pandanwangi
2. Rumah penduduk desa Pandanwangi
3. Lokasi tempat proyek dibangun

D. SUMBER DATA

Yang dimaksud dengan sumber data adalah seorang atau lebih yang terpilih menjadi responden dan dokumen-dokumen. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa Pandanwangi
2. Ketua PPK dan Ketua LPMD
3. Tokoh Masyarakat

Disamping itu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) juga menjadi sumber data penelitian ini.

E. PENGUMPULAN DATA

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan, terutama yang berkaitan dengan fokus penelitian.
2. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung ke lokasi proyek yang dibangun.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari dan menyalin dokumen-dokumen yang sesuai dengan fokus penelitian.

F. INSTRUMEN PENELITIAN

Dalam memperoleh data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik dan cermat, lengkap dan sistematis, maka penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yang terdiri dari :

1. Peneliti sendiri, yaitu terjun langsung ke obyek penelitian dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi.

2. Pedoman wawancara yaitu berupa daftar pertanyaan sebagai panduan dalam berhubungan dengan responden untuk memperoleh data yang dikehendaki.
3. Alat-alat tulis menulis berupa bulpoint, buku catatan dan sebagainya.

G. ANALISIS DATA

Menurut Patten dalam Moleong (2002:103) yang dimaksud analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Miles dan Huberman (1992:16-17) mengemukakan bahwa “analisis data kualitatif” terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu:

1. Reduksi Data.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pmusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data (kasar) yang muncul dari catatan tertulis dilapangan.

2. Penyajian Data.

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi.

Setelah dilakukan reduksi data dan analisa data kemudian diambil kesimpulan yang memang menjawab permasalahan yang muncul. Penarikan kesimpulan didasarkan pada data-data yang sudah diolah sebelumnya.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Kondisi Geografis

Desa Pandanwangi merupakan salah satu dari dua puluh tiga desa di Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur. Secara geografis Desa Pandanwangi merupakan daerah dataran rendah, dengan tinggi 35 m² dari permukaan laut. Desa Pandanwangi memiliki luas wilayah kurang lebih 203 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sanding Rowo.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kenongosari
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mojoagung

Jarak Desa Pandanwangi dengan pusat pemerintahan Kecamatan Soko berjarak kurang lebih 4 km, sementara jarak dengan ibukota kabupaten kurang lebih 37 km.

Adapun dari luas wilayah yang telah disebutkan diatas pemanfaatan lahannya beraneka ragam. Untuk mengetahui lebih jelas tentang penggunaan tanah di Desa Pandanwangi dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1
LUAS WILAYAH DESA MENURUT PENGGUNAANNYA

No.	Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Sawah	165
2.	Pekarangan	37
3.	Lain-lain	1
Jumlah		203

Sumber : Kantor Desa Pandanwangi, 2005

Dari data tersebut tergambar bahwa wilayah Desa Pandanwangi memiliki sawah yang cukup luas dan merupakan lahan utama bagi penduduk Desa Pandanwangi yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani.

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban berdasarkan hasil data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Pandanwangi sebanyak 2679 jiwa yang terdiri dari 1197 penduduk laki-laki dan 1482 jiwa penduduk perempuan dengan jumlah Kepala Keluarganya yaitu 722 orang Kepala Keluarga.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jumlah penduduk Desa Pandanwangi dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini :

Table 2
JUMLAH PENDUDUK DIRINCI MENURUT KELOMPOK
USIA & JENIS KELAMIN

No.	Golongan Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 tahun – 3 tahun	46	61	107
2.	4 tahun – 6 tahun	94	107	201
3.	7 tahun – 12 tahun	223	239	462
4.	13 tahun – 15 tahun	145	160	305
5.	16 tahun – 18 tahun	195	209	404
6.	> 19 tahun	494	706	1200
Jumlah		1197	1482	2679

Sumber : Kantor Desa Pandanwangi tahun 2005

Berdasarkan Tabel 2 bahwa jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin diketahui bahwa penduduk dengan kelompok umur 19 th keatas merupakan jumlah penduduk yang terbanyak yaitu 1200 jiwa. Jumlah penduduk dengan kelompok umur ini menunjukkan bahwa penduduk di Desa Pandanwangi didominasi oleh generasi muda yang merupakan aset potensial untuk disertakan di dalam bidang pembangunan di desa.

Potensi penduduk Desa Pandanwangi untuk membangun secara lebih khusus dapat dilihat dari tabel kualitas angkatan kerja itu menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dibawah ini :

Tabel 3
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
DESA PANDANWANGI KEADAAN TAHUN 2005

No.	Keterangan	Jumlah (orang)
1.	Tidak/belum sekolah	215
2.	SD	325
3.	SLTP	140
4.	SLTA	76
5.	Akademik	4
6.	Perguruan tinggi	6
Jumlah		766

Sumber : Kantor Desa Pandanwangi, tahun 2005

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Pandanwangi yang memiliki pendidikan SLTA keatas masih sedikit sehingga nantinya masih diperlukan usaha yang cukup besar untuk memberdayakan penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah itu.

Selanjutnya keadaan penduduk Desa Pandanwangi menurut mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4
JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN
DESA PANDANWANGI KEADAAN TAHUN 2005

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1.	Petani	900
2.	Buruh Tani	1013
3.	PNS/ ABRI/POLRI	16
4.	Pedagang	623
5.	Pertukangan	19
Jumlah		2571

Sumber : Kantor Desa Pandanwangi, tahun 2005

Berdasarkan data Tabel 4 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai buruh tani merupakan jumlah terbanyak dan

kemudian disusul oleh penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani. Karena itu potensi ini perlu mendapat pembinaan terutama dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang dijalankan sekarang ini.

Dari keseluruhan uraian mengenai penduduk di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko dapat memberikan gambaran tentang potensi keseluruhan yang dimiliki masyarakat desa tersebut terutama dalam mendukung pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga dapat berjalan dengan efektif.

3. Kondisi Pemerintahan

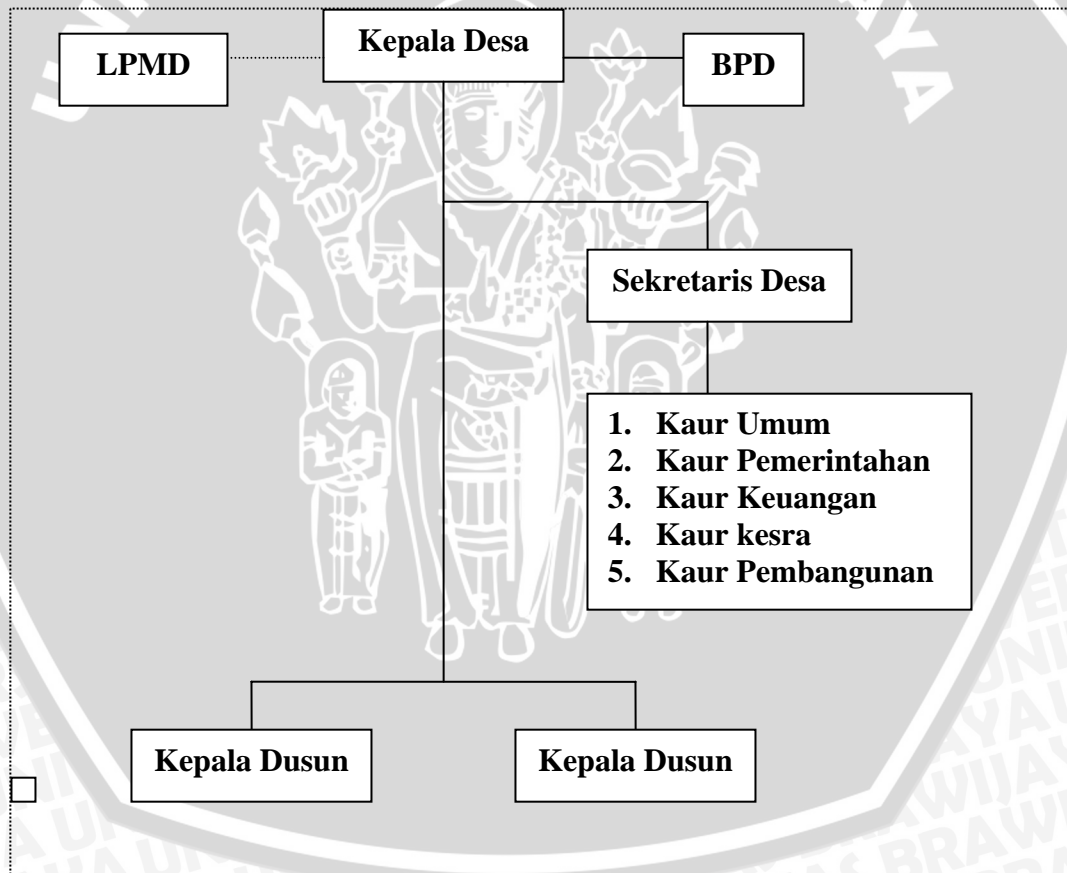
Pemerintahan desa adalah pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terendah langsung dibawah Camat. Dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan di Desa Pandanwangi, sangat diperlukan peran dari aparat kecamatan terutama pada awal pelaksanaan program ini yaitu untuk mensosialisasikan program ini kepada masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum di desa, maka Kepala desa dibantu oleh Sekretaris desa serta perangkat desa lainnya berhak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan

umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban serta menumbuhkan dan mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai studi utama pelaksanaan pemerintahan desa.

Untuk lebih jelas mengenai susunan organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat desa dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini :

Gambar 1
SUSUNAN ORGANISASI & TATA KERJA PERANGKAT DESA
PANDANWANGI



Sumber : Kantor Desa Pandanwangi tahun 2005

Untuk dapat menjalankan pembangunan desa dengan baik, maka perangkat desa harus juga memiliki kualitas yang baik. Untuk desa Pandanwangi kualitas aparatnya dapat dilihat dari tingkat pendidikannya seperti tabel berikut ini :

Tabel 5
TINGKAT PENDIDIKAN APARAT DESA PANDANWANGI

No.	Keterangan	Tingkat pendidikan
1.	Kepala Desa	S1
2.	Sekretaris Desa	SLTA
3.	Kaur Umum	S1
4.	Kaur Pemerintahan	SLTA
5.	Kaur Keuangan	SLTP
6.	Kaur Kesra	SLTP
7.	Kaur Pembangunan	SLTA
8.	Kepala Dusun	SLTA

Sumber : Kantor Desa Pandanwangi, tahun 2005

Dilihat dari tingkat pendidikannya sudah cukup baik, sehingga dalam Program Pengembangan Kecamatan ini perangkat desa dapat bekerja sama dengan masyarakat yang memegang peran utama dalam pelaksanaannya.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau yang saat ini disebut Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan lembaga lain di desa yang disebut dalam pasal 202, UU No. 32 tahun 2005. LPMD dalam pelaksanaan PPK ini mempunyai peran yang cukup penting yaitu sebagai penyelenggara Musyawarah Desa untuk proses sosialisasi, mengurus administrasi dan melaporkan kemajuan kegiatan. Struktur LPMD Desa Pandanwangi dapat dilihat pada lampiran 1.

Selain itu juga terdapat lembaga lain didesa ini yaitu BPD yang memimpin dan anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat sesuai dengan UU No. 32 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah pasal 209 yaitu, “Badan Perwakilan Desa (BPD) berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.”

Untuk itu didesa Pandanwangi BPD yang susunan organisasinya dapat dilihat dalam lampiran 2 dalam PPK juga berfungsi sebagai wakil masyarakat serta mengawasi pelaksanaan program ini.

B. PELAKSANAAN PPK

1. Persiapan PPK

Sebelum dilaksanakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), sebagai langkah awal dalam pelaksanaannya dimulai dengan proses persiapan. Dalam proses persiapan ini meliputi kegiatan memasyarakatkan atau mensosialisasikan PPK kepada penduduk yang tergolong miskin. Kegiatan sosialisasi ini sangat diperlukan disamping untuk pengenalan juga dalam rangka memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan tentang mekanisme pelaksanaan PPK yang akan diterima oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan persiapan-persiapan pelaksanaan proyek atau kegiatan PPK dilakukan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa (Musdes). Sebagaimana ketentuan dan tradisi didalam kehidupan masyarakat Desa Pandanwangi didalam melakukan suatu kegiatan selalu di musyawarahkan atas kesadaran bahwa kehidupan dan ikatan kekeluargaan serta semangat gotong royong yang sangat tinggi.

Setelah masyarakat memahami keberadaan PPK sebagai pedoman untuk pengentasan kemiskinan dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai konsepsi dasar, tujuan, sasaran, prinsip-prinsip serta proses pendanaan dan mekanisme pelaksanaan PPK melalui berbagai forum ditingkat pusat maupun daerah. Seperti yang diungkapkan Ketua Tim PPK di tingkat Desa Pandanwangi Pak Budi Setyo tanggal 10 April 2006, bahwa :

“Proses sosialisasi PPK di Desa Pandanwangi dari Musyawarah Desa I yang membahas tentang proses sosialisasi kepada kelompok masyarakat dan kelompok perempuan. Kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan pada saat jamaah tahlil kepada anggota masyarakat.”

Hal yang sama di ungkapkan oleh Pak Prayitno sebagai berikut :

”Sosialisasi di tingkat desa ini melibatkan langsung para perangkat desa dan anggota masyarakat dalam forum Musdes I untuk mempublikasikan tentang informasi PPK kepada masyarakat dan dipilihnya para pelaku PPK di tingkat desa.” (Wawancara dengan Kepala desa Pandanwangi tanggal 10 April 2006)

Ini berarti Desa Pandanwangi yang juga termasuk salah satu desa di Kecamatan Soko mendapatkan kesempatan untuk memperoleh dana PPK melalui prosedur yang telah ditentukan dan tidak mempunyai masalah tanggungan dan pajak dari pemerintah daerah dan yang terpenting adalah desa tersebut termasuk dalam golongan desa miskin yang dilihat dari jumlah kepala keluarga miskin yang ada didesa tersebut.

Jumlah Kepala Keluarga miskin di desa Pandanwangi pada awal pelaksanaan PPK dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6
DATA KEPENDUDUKAN DESA PANDANWANGI TH 2005

Dukuh/ RW	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Jenis Kelamin			Pengangguran
			L	P	Jmlh	
1. Padas	412	164	583	773	1356	208
2. Tanggungan	310	137	614	709	1323	280
Jumlah	722	301	1197	1482	2679	488

Sumber : Kantor Desa Pandanwangi tahun 2005

Berdasarkan keterangan diatas Desa Pandanwangi berhak mendapatkan dana PPK karena masih merupakan desa tertinggal yang jumlah kepala keluarga miskinnya dan jumlah pengangguran yang cukup banyak.

Dalam Musyawarah Desa I di Desa Pandanwangi juga telah disosialisasikan seluruh informasi tentang PPK dengan melibatkan tokoh antara lain: Kepala Desa, LPMD, BPD, Tokoh Masyarakat, Kelompok Perempuan, Ketua RT/RW dan mengikutsertakan orang miskin. Selain itu

juga dalam Musdes I menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa serta fasilitator desa yaitu: 1). Ketua: Budi Seyto, 2). Sekretaris: Atrup, 3). Bendahara: Sugianto, 4). Kader Teknis: Nirwanto, 5). FD Perempuan: Siti Mulyasaroh, 6). FD Laki-laki: Jaswadi.

2. Perencanaan

a) Penggalan Gagasan

Setelah dilakukan Musdes I langkah selanjutnya adalah penggalan gagasan yang dilakukan kepada kelompok-kelompok masyarakat dan dusun yang ada di Desa Pandanwangi setelah mereka mendapatkan penjelasan atau sosialisasi tentang PPK. Untuk efisiensi maka kegiatan penggalan gagasan dengan memanfaatkan pertemuan rutin yang sudah ada (formal maupun informal) baik yang diselenggarakan oleh dusun maupun kelompok masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kuwat bahwa :

“ Dalam pertemuan kelompok dan dusun tersebut setelah mendapatkan sosialisasi tentang PPK kemudian anggota kelompok atau dusun membahas apa yang menjadi gagasan kegiatan kelompok atau dusun untuk memenuhi kebutuhannya.” (Wawancara dengan Ketua LPMD tanggal 11 April 2006).

Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala desa, Ketua LPMD, Fasilitator Desa, Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat. Dikatakan pula oleh Ibu Siti Mulyasaroh, bahwa :

”Proses sosialisasi dan penggalian gagasan PPK Desa Pandanwangi juga dilaksanakan oleh kelompok perempuan guna menetapkan usulan perempuan.” (Wawancara dengan FD perempuan tanggal 11 April 2006).

Gagasan-gagasan dari kelompok dan dusun selanjutnya dimasukkan dalam sebuah daftar gagasan dan dipisahkan antara gagasan dari kelompok perempuan dengan gagasan dari kelompok laki-laki. Gagasan dari kelompok perempuan selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Khusus Perempuan di tingkat desa.

Musyawarah Khusus Perempuan dilakukan dalam rangka membahas gagasan dari kelompok perempuan dan menetapkan usulan kegiatan simpan pinjam yang merupakan aspirasi khusus dari kelompok perempuan sebagai bagian usulan desa. Usulan hasil musyawarah tersebut selanjutnya dilaporkan ke forum Musyawarah Desa II untuk disahkan sebagai bagian dari usulan desa ke Musyawarah Antar Desa II (MAD II).

b) Musyawarah Desa II

Hasil yang dicapai dalam Musyawarah Desa ke II yang diadakan pada tanggal 26 Oktober 2005 bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan, hasil dari proses penggalian gagasan ditingkat kelompok dan tingkat dusun.

Adapun hasil yang dicapai dalam Musdes ke II tersebut antara lain:

1. Usulan kegiatan yang diajukan antara lain berupa pembangunan sarana prasarana fisik, sarana pendidikan dan kegiatan ekonomi produktif berupa usaha simpan pinjam. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh

Ketua TPK Bapak Budi setyo bahwa:

“ Musyawarah ditingkat dusun menghasilkan 4 usulan berupa kegiatan fisik pembangunan sarana pendidikan, irigasi, makadam jalan dan kegiatan ekonomi produktif / simpan pinjam.” (Wawancara dengan Ketua TPK Desa Pandanwangi tanggal 10 April 2006).

Kegiatan yang diusulkan antara lain pembangunan gedung TPQ, irigasi, makadam jalan dan simpan pinjam. Dari keempat usulan tersebut ternyata yang layak didanai dan mendapat rangking tertinggi adalah pembangunan gedung TPQ dan usaha simpan pinjam.

2. Memilih dan menetapkan Tim Penulis Usulan.

Dalam Musdes II ditetapkan pula Tim Penulis Usulan yaitu: 1). Kuwat selaku Ketua LPMD, 2). Jaswadi dan Siti Muyasaroh selaku Fasilitator Desa, 3). Suwardi selaku seksi Kamtibmas.

Tim Penulis Usulan bertugas menguraikan secara tertulis gagasan kegiatan masyarakat yang sudah dimusyawarahkan pada Musdes II dan musyawarah khusus perempuan serta disetujui menjadi usulan

desa untuk diajukan pada Musyawarah Antar Desa ke II. Seperti yang dikemukakan oleh Pak Kuwat, bahwa :

”Usulan yang telah disusun oleh Tim Penulis Usulan kemudian dikonfirmasi kepada kelompok masyarakat yang bersangkutan selanjutnya diajukan ke kecamatan untuk diverifikasi.” (Wawancara dengan Ketua LPMD tanggal 11 April 2006).

Dikatakan pula oleh Pak Budi Setyo sebagai berikut :

”Kegiatan verifikasi ini sangat penting dan bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan untuk didanai dan dilaksanakan oleh PPK.” (Wawancara dengan Ketua TPK Desa Pandanwangi tanggal 11 April 2006).

Dari hasil wawancara diatas kemudian usulan yang telah diverifikasikan dibahas dan ditetapkan pada Musyawarah Antar Desa ke II.

c) **Musyawarah Antar Desa II dan III**

Dalam Musyawarah Antar Desa Ke II usulan kegiatan yang masuk di kecamatan hanya tersaring 12 usulan yang disetujui oleh Tim Verifikasi. Dari 12 usulan yang didanai oleh Bantuan PPK sebagian besar berbentuk bantuan murni / hibah, dengan kata lain desa menerima bantuan tidak perlu mengembalikan sepeserpun uang dari dana yang dipinjam, yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan dan pinjaman ekonomi. Dalam pinjaman ekonomi dikenakan bunga pinjaman bagi penerima manfaat bantuan PPK.

Desa yang mendapatkan dana bantuan PPK berbentuk ekonomi sebanyak 8 desa dan yang lainnya berupa pembangunan infrastruktur. Penerima dana PPK terbesar adalah Desa Prambontergayang yaitu Rp. 91.896.850,- dari jumlah seluruh dana yang dicairkan di kecamatan Soko. Berikut ini daftar usulan kegiatan desa yang menerima dana bantuan PPK kecamatan Soko Kabupaten Tuban tahun anggaran 2005-2006 dibawah ini :

Tabel 7
DAFTAR USULAN KEGIATAN DESA YANG MENERIMA DANA BANTUAN PPK TAHUN ANGGARAN 2005-2006

No.	NAMA DESA	KEGIATAN		PEMBIAYAAN (Rp)	
		JENIS	NAMA	PPK	SWADAYA
1.	Prambontergayang	Pendidikan	Pemb. Gedung RA	81.896.850	0
		SPP	JT.Dusun Sawahan	10.000.000	48.000
2.	Simo	Pendidikan	Pemb. Gedung RA	68.536.200	1.000.000
3.	Pandanagung	Sarana/Parasara	Pengerasan jalan	68.400.500	0
		SPP	JT. Pandanagung	10.000.000	109.500
4.	Kendalrejo	Sarana/Parasara	Saluran irigasi	72.746.750	0
		SPP	JT. Kemdalrejo	10.000.000	145.000
5.	Klumpit	Pendidikan	Pemb. Gedung MI	53.490.600	2.000.000
6.	Pandanwangi	Pendidikan	Pemb. Gedung TPQ	77.104.550	5.000.000
		SPP	JT. Pandanwangi	9.500.000	221.000
7.	Wadung	Pendidikan	Pemb. Gedung RA	57.940.850.	0
8.	Jegulo	Pendidikan	Pemb. Gedung TK	53.108.950	0
		SPP	JT. Jegulo	10.000.000	41.000
9.	Mojoagung	Sarana/Pasara	Penguatan badan jalan	69.773.600	15.000.000
10	Gununganyar	Sarana/Prasara	Plengsengan jalan	59.019.750	0

		SPP	JT. Dusun Krajan	10.000.000	109.500
11	Bangunrejo	Pendidikan	Pemb. Gedung TK	70.129.400	0
		SPP	PKK Ds.Bangunrejo	10.000.000	82.000
12	Sumurcinde	SPP	JT.Dusun Warang	10.000.000	270.250
JUMLAH TOTAL				811.648.000	24.026.250

Sumber : Kantor Desa Pandawangi Tahun 2005

Dalam Musyawarah Antar Desa ke II yang dilakukan oleh forum ditingkat kecamatan bertujuan membahas, memilih dan menetapkan peringkat kegiatan dari masing-masing desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Budi Setyo Ketua TPK desa Pandanwangi yaitu:

” Dari hasil usulan kegiatan yang berasal dari desa kemudian diserahkan kepada Fasilitator Kecamatan guna dikompetisikan.” (Wawancara dengan Ketua TPK desa Pandanwangi tanggal 10 April 2006).

Pak Prayitno juga menambahkan, bahwa : ”Sesuai dengan hasil Musyawarah Antar Desa ke II kemudian ditetapkan jadwal untuk Musyawarah Antar Desa ke III.” (Wawancara dengan Kepala Desa Pandanwangi tanggal 10 April 2006)

Selanjutnya dalam MAD II juga ditetapkan jadwal Musyawarah Antar Desa ke III (MAD III) serta menetapkan alokasi dana kegiatan berdasarkan peringkat usulan kegiatan yang disetujui dalam MAD ke II, desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatannya.

d) Musyawarah Desa III

Musyawarah Desa ke III desa Pandanwangi dilaksanakan pada tanggal 13 November 2005 yang merupakan forum untuk mensosialisasikan kembali hasil penetapan alokasi dana PPK yang diputuskan dalam MAD III. Bagi desa yang mendapatkan dana PPK dalam musyawarah desa ketiga diharapkan disepakati jadwal pelaksanaan tiap kegiatan yang akan dilaksanakan, realisasi sumbangan dari masyarakat, serta ditetapkannya susunan lengkap Tim Pengelola Kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan yang didanai.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Dari hasil musyawarah antar desa ketiga yang telah disetujui dalam pelaksanaan kegiatan PPK desa Pandanwangi ada dua yaitu pembangunan gedung TPQ dan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan. Sebelum dilaksanakannya kegiatan tersebut terlebih dahulu diawali dengan proses pencairan dana kemudian diserahkan kepada anggota TPK yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2006 di Balai Desa Pandanwangi (Berdasarkan berita acara musyawarah pertanggungjawaban PPK desa Pandanwangi tahun anggaran 2005-2006).

Dikatakan oleh Pak Budi Setyo, bahwa : "Jumlah dana PPK yang diterima Desa Pandanwangi sebesar Rp.87.970.300,-. Pencairan dana PPK untuk Desa Pandanwangi dilakukan dalam tiga tahap pencairan." (Wawancara dengan Ketua TPK Desa Pandanwangi, tanggal 11 April 2006)

Untuk proses pencairan dana PPK dapat dilihat dalam Tabel 8 dibawah ini:

Tabel 8
PROSES PENCAIRAN DANA PPK DESA PANDANWANGI
TAHUN ANGGARAN 2005-2006

No.	Proses Pencairan	Jumlah (%)
1.	Tahap I	40 %
2.	Tahap II	40 %
3.	Tahap III	20 %

Sumber: Kantor Desa Pandanwangi tahun 2005

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa proses pencairan dana PPK dibagi dalam tiga tahap yaitu: 1). Tahap I sebesar 40 %. 2). Tahap II sebesar 40 %, dan 3). Tahap III sebesar 20 %. Ketiga tahapan ini merupakan mekanisme proses pencairan dana PPK dari pusat.

Jumlah keseluruhan dana PPK Untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana maupun kegiatan simpan pinjam sebesar Rp. 87.970.300,- yang dapat dilihat dalam tabel 9 tentang Rekapitulasi Anggaran Biaya PPK Desa Pandanwangi dibawah ini:

Tabel 9
REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA PPK
DESA PANDANWANGI TH ANGGARAN 2005-2006

No.	Kegiatan	Sumber Anggaran Biaya(Rp)		Jumlah (Rp)
		PPK	Swadaya	
1.	Keg. Sarana & Prasarana: Pembangunan gedung TPQ	73.249.300	5.000.000	78.249.300
2.	Keg. Ekonomi produktif: Simpan pinjam	9.500.000	221.000	9.721.000
	Jumlah	82.749.300	5.221.000	87.970.300

Sumber: Kantor Desa Pandanwangi, 2005

Dari tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa yang diusulkan dalam Musdes ke III Desa Pandanwangi tahun anggaran 2005-2006 terdiri dari dua jenis proyek atau kegiatan. Pertama, kegiatan sarana dan prasarana pendidikan yaitu pembangunan gedung TPQ biaya yang dialokasikan untuk pembangunan gedung TPQ ini sebesar Rp. 78.249.300 dengan rincian Rp. 73.249.300,- dari bantuan PPK dan sebesar Rp. 5.000.000,- dari swadaya masyarakat setempat. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi produktif dalam bentuk simpan pinjam sebesar Rp. 9.721.000,- dengan rincian Rp. 9.500.000,- dari dana PPK dan Rp. 221.000,- dari swadaya anggotanya.

Setelah dana PPK diterima oleh masyarakat Desa Pandanwangi maka langkah selanjutnya dimulailah pelaksanaan kegiatan baik untuk pembangunan sarana dan prasarana maupun kegiatan ekonomi produktif berdasarkan rencana kerja kegiatan PPK di Desa Pandanwangi :

a) Pembangunan Gedung TPQ

Pembangunan gedung TPQ di Desa Pandanwangi merupakan salah satu program pelaksanaan PPK tahun anggaran 2005-2006. Dengan dibangunnya gedung TPQ ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan moral keagamaan generasi penerus bangsa yang berakhlak dan berpengetahuan luas.

Dalam kegiatan PPK Desa Pandanwangi mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.73.249.300,- untuk pembangunan gedung TPQ. Kemudian masyarakat desa Pandanwangi mendukungnya dengan memberikan bantuan dana swadaya sebesar Rp. 5.000.000,- sehingga total dana yang digunakan untuk pembangunan gedung TPQ sebesar RP. 78.249.300,-. Rencana anggaran biaya proyek secara detail dari pembangunan gedung TPQ dapat dilihat dalam lampiran 3.

Alasan dibangunnya gedung TPQ ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Prayitno selaku Kepala Desa Pandanwangi, bahwa :

”Pembangunan gedung TPQ ini sangat dibutuhkan oleh banyak warga desa Pandanwangi karena sebelumnya anak-anak didesa Pandanwangi tersebut masih menempati sebuah masjid. Jadi alasan pembangunan ini adalah kami ingin anak-anak tersebut mendapatkan tempat sendiri yang nyaman dalam mendapatkan ilmu.” (Wawancara dengan Kepala Desa Pandanwangi tanggal 2 Mei 2006).

Pembangunan gedung ini dilaksanakan dengan tenaga kerja dari desa Pandanwangi sendiri, seperti pernyataan dari Bapak Budi Setyo bahwa,

” Dalam pelaksanaan proyek ini tenaga kerjanya berasal dari masyarakat desa Pandanwangi sendiri dengan dengan alasan memberdayakan sumber daya manusia yang tergolong miskin untuk mendapatkan lapangan pekerjaan selain itu pelaksanaan proyek ini tidak boleh adanya sistem tender (borongan) sehingga seluruh tenaga kerjanya berasal dari warga desa Pandanwangi sendiri.” (Wawancara dengan Ketua TPK Desa Pandanwangi tanggal 2 Mei 2006).

Seluruh masyarakat Desa Pandanwangi menyambut baik dengan adanya pembangunan gedung TPQ dengan alasan seperti yang dikemukakan oleh Pak Suyono yaitu,

” Kami sangat senang dengan dibangunnya gedung TPQ ini sebab kami warga yang tidak mempunyai pekerjaan dapat membantu pengerjaan gedung TPQ secara gotong royong dengan warga yang lain selain itu kami juga senang sebab anak-anak kami mempunyai tempat belajar sendiri.” (Wawancara dengan seorang warga desa Pandanwangi tanggal 2 Mei 2006).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Sunarti yaitu,

” Sekarang anak saya bisa belajar dengan nyaman dengan dibangunnya gedung TPQ ini karena sudah mempunyai tempat sendiri tidak menumpang lagi di masjid.” (Wawancara dengan seorang warga Desa Pandanwangi tanggal 2 Mei 2006).

Selain itu juga dikemukakan oleh Pak Kamsi yang memberikan pendapatnya dalam pembangunan gedung TPQ ini yaitu,

”Saya sangat setuju sekali dibangunnya gedung TPQ karena TPQ dititik beratkan pada pendidikan moral keagamaan, terutama membentuk mental anak supaya berpengetahuan tentang agama yang ada di Desa Pandanwangi mayoritas dari seluruh penduduknya beragama islam. Selain itu juga pemerintah tingkat desa sangat aspiratif dalam pembangunan mental anak perlu wadah yaitu lewat TPQ maka sejak dini anak-anak sudah harus dikenalkan dengan pendidikan agama disamping pendidikan pada umumnya yaitu lewat TK atau SD.” (Wawancara dengan seorang warga Desa Pandanwangi tanggal 2 Mei 2006)

Dari ke empat hasil wawancara tersebut diatas dengan jelas dapat diketahui bahwa pembangunan gedung TPQ di Desa Pandanwangi mendapatkan partisipasi dari masyarakat dan memberikan manfaat yang

besar bagi seluruh warganya sehingga dapat meningkatkan kualitas generasi muda yang bermoral dan berakhlak serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa Pandanwangi.

b) Kegiatan Ekonomi Produktif

Pemberian dana bantuan PPK Desa Pandanwangi juga diwujudkan dalam pemberian bantuan modal usaha yang dikelola oleh kelompok simpan pinjam perempuan. Anggota kelompok simpan pinjam terdiri dari para para kelompok perempuan jamaah tahlil " Miftahul Janah ". Hal ini diungkapkan oleh Ibu Siti Fadilah bahwa,

" Bantuan simpan pinjam ini memang dikhususkan untuk kelompok jamaah tahlil perempuan "Miftahul Janah". Jumlah pemanfaat dana sebanyak 20 orang yang mayoritas ekonominya menengah ke bawah sehingga sangat membutuhkan tambahan modal usaha dan membuka lapangan kerja." (Wawancara dengan Ketua Kelompok Jamaah Tahlil tanggal 3 Mei 2006).

Dengan adanya kelompok simpan pinjam ini diharapkan dapat menguatkan keberadaan kelompok perempuan dan meningkatkan ekonomi kelompok perempuan. Dikatakan pula oleh pak Budi Setyo, bahwa :

" Dengan adanya kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan di desa Pandanwangi sangat membantu untuk membuka usaha. Sebenarnya prosedur permohonan pinjaman tidak sulit, jika anggota yang mau meminjam menjelaskan maksud pinjaman yaitu jenis usaha apa yang akan dikerjakan dan jika penilaiannya layak oleh pengurus maka permohonannya dapat diberikan." (Wawancara dengan ketua TPK Desa pandanwangi, tanggal 3 Mei 2006).

Sehingga dengan alasan tersebut kelompok simpan pinjam jamaah tahlil "Miftahul Janah" di Desa Pandanwangi mendapatkan bantuan dana simpan pinjam dari PPK sebesar Rp.9.500.000,- ditambah dengan dana swadaya dari anggota sebesar Rp.221.000,-. Rencana anggaran biaya untuk kegiatan simpan pinjam dapat dilihat dilampiran 4.

Pengembalian pinjaman kegiatan simpan pinjam ini harus dilaporkan kepada unit pelaksana kegiatan di kecamatan. Karena dana tersebut nantinya digulirkan untuk kelompok lain agar dana tersebut dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat miskin di Kecamatan Soko. Rencana pengembalian kredit pinjaman kegiatan simpan pinjam ini dapat dilihat pada lampiran 5.

Jangka waktu pengembalian dana simpan pinjam ini selama 12 bulan dengan suku bunga 18 % per tahun dengan jumlah bunga Rp.1.710.000,-. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan pembayaran sebulan sekali. Untuk mengetahui pembayaran dapat dilihat Kartu Kredit SPP/UEP dalam lampiran 6.

Jadi setiap anggota kelompok simpan pinjam setiap bulannya harus mengembalikan angsuran pokok sebesar Rp.791.700,- dan angsuran bunga sebesar Rp.142.500,- dengan bunga angsuran sebesar 1.5 % tetap/tahun, sampai bulan Mei kelompok ini masih mempunyai sisa pinjaman

Rp.6.333.200,-. Berikut ini dapat dilihat anggota yang memanfaatkan dana simpan pinjam menurut Rencana angsuran Kredit dalam lampiran 7.

Manfaat yang diperoleh dengan adanya bantuan simpan pinjam ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pra sejahtera dan dapat mengurangi pengangguran. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Siti Fadilah, bahwa :

” Pemberian bantuan simpan pinjam ini digunakan sebagai modal usaha bagi para anggotanya yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai pedagang, untuk pengembalian pinjaman hingga saat ini berjalan lancar dilakukan paling lambat tanggal 4 setiap bulannya.” (Wawancara dengan Ketua Jamaah Tahlil tanggal 4 Mei 2006).

Manfaat lain yang diperoleh oleh para anggota jamaah tahlil yang meminjam dana tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sumiati, bahwa :

” Dengan adanya bantuan simpan pinjam ini sangat membantu kami yang berpenghasilan rendah. Pinjaman ini saya gunakan untuk berjualan sayuran di pasar agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.” (Wawancara dengan salah seorang anggota simpan pinjam, tanggal 4 Mei 2006)

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Jasmirah sebagai berikut :

” Pinjaman ini saya gunakan untuk modal membuka warung nasi, untuk tambahan penghasilan dari suami saya yang berkerja sebagai buruh tani dan untk biaya sekolah anak saya.” (Wawancara dengan salah seorang anggota simpan pinjam, tanggal 4 Mei 2006).

Sedangkan dari hasil wawancara dengan anggota jamaah tahlil yang tidak mengambil pinjaman tersebut antara lain seperti yang diungkapkan oleh Ibu Suparti yaitu :

”Saya merasa lebih tenang dan lebih santai bila menggunakan modal sendiri dari pada modal pinjaman saya harus memikirkan jasanya (bunganya 1,5%) setiap bulannya dan bila telat bayarnya langsung di umumkan pada waktu hari pertemuan jamaah tahlil, disitu nanti malu jadinya, jadi lebih baik tidak meminjam. karena simpan pinjam PPK itu dana perguliran maka semuanya harus tepat waktu pengembaliannya.” (Wawancara dengan seorang anggota jamaah tahlil yang tidak meminjam, tanggal 26 Juni 2006).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Sunti’ah yang bekerja sebagai penjual sayur keliling yakni :

”Saya tidak mau repot menanggung utang karena dengan berjualan sayur keliling ke desa-desa cukup dengan modal sendiri yang sekali berangkat dengan modal Rp.250.000,- yang omsetnya setiap hari Rp.300.000,- bahkan bisa lebih saya rasa sudah cukup membantu suami yang bekerja sebagai petani untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.” (Wawancara dengan seorang anggota jamaah tahlil yang tidak meminjam, tanggal 26 Juni 2006).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kegiatan simpan pinjam yang anggotanya adalah jamaah tahlil kelompok perempuan di Desa Pandanwangi ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi para anggotanya. Diharapkan pengembalian pinjaman ini berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal.

4. Pengendalian Kegiatan

a) Pemantauan

Pemantauan merupakan proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahapan PPK di mulai dari persiapan, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Hasil pemantauan ini menjadi input untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan atau dukungan teknis kepada pelaku PPK dan masyarakat.

Tujuan pemantauan seperti yang diungkapkan oleh Pak Budi Setyo yaitu,

” Tujuan dari pemantauan untuk memastikan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur PPK, selain itu pemantauan juga ditujukan untuk melihat kinerja semua pelaku PPK.” (Wawancara dengan Ketua TPK Desa Pandanwangi tanggal 4 Mei 2006).

Adapun jenis kegiatan pemantuan PPK di desa Pandanwangi dilakukan dengan 2 langkah yaitu: **Pertama**, *Pemantauan Internal*. Pemantauan internal dilakukan oleh pihak terkait dalam program PPK itu sendiri yang meliputi: pemantauan partisipatif oleh masyarakat, pemantauan oleh konsultan dan fasilitator, dan pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang. **Kedua**, *Pemantauan Eksternal*. Adalah pemantauan yang dilakukan secara independen oleh organisasi.

b) Pelaporan

Kegiatan pelaporan PPK diusahakan tepat waktu, karena menyangkut seberapa jauh keberhasilan pelaksanaannya. Adanya hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dapat segera diketahui oleh pihak pusat dan akan mencari alternatif jalan keluar dari permasalahan.

Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan PPK dilakukan melalui dua jalur yaitu: *Pertama*, Pelaporan Jalur Struktural, melibatkan beberapa pihak baik sebagai pembuat maupun penerima laporan seperti: Ketua TPK, PjOK, Camat, Tim Koordinasi PPK Kabupaten, Bupati, Tim Koordinasi PPK Propinsi dan Pusat, serta Sekretariat PPK Pusat. Dengan langkah sebagai berikut: Ketua TPK membuat laporan bulanan berisi tentang kemajuan fisik, tenaga kerja, pencairan dana untuk kegiatan prasarana dan kegiatan ekonomi produktif yang ditujukan kepada PjOK. Lalu PjOK membuat laporan akhir setiap tiga bulan sekali yang menggambarkan kondisi terakhir pelaksanaan PPK kepada Tim Koordinasi PPK Kabupaten, kemudian Tim Koordinasi PPK Kabupaten melaporkan pada Gubernur/ Tim Koordinasi Propinsi, selanjutnya disampaikan pada Tim Koordinasi PPK Pusat

Pelaporan jalur Fungsional melibatkan beberapa pihak yaitu: Fasilitator Kecamatan (FK), Konsultan Manajemen Kabupaten (KM-

Kab.), KM- Nasional diwilayah dan KM-Nasional di Pusat. Adapun alur pelaporan fungsional dapat dilihat pada tabel 10 dibawah ini:

Tabel 10
ALUR PELAPORAN JALUR FUNGSIONAL

Pengirim	Laporan asli dikirim ke:	Tgl pengiriman	Copy laporan dikirim ke:
FK	KM-Kab	Tgl 1 tiap bln	<ul style="list-style-type: none"> • PjOK • FK sbg arsip
KM-Kab	Korwil	Tgl 5 tiap bln	<ul style="list-style-type: none"> • TK-Kab • KM-Kab sbg arsip
Korwil	Team Leader KM-Nasional	Tgl 10 tiap bln	<ul style="list-style-type: none"> • TPK- Propinsi • Korwil sbg arsip
Team Leader KM- Nasional	Pimpinan PPK Pusat	Tgl 20 tiap bln	<ul style="list-style-type: none"> • Team Leader KM-Nasional sbg arsip

Sumber : Kantor desa Pandanwangi tahun 2005

5. Pelestarian

Pengelolaan kegiatan PPK harus dijamin memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. Hasil-hasil kegiatan PPK yang berupa prasarana, simpan pinjam merupakan aset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan dan dilestarikan. Sebagaimana sanksi yang ditentukan oleh pemerintah, jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik maka desa atau kecamatan tidak akan mendapatkan lagi dana PPK untuk tahun berikutnya.

Tim pelestarian PPK Desa Pandanwangi tetap dikendalikan oleh pengurus TPK yaitu: Ketua, Budi Setyo; Sekretaris, Atrup; dan Bendahara, Sugianto.

Tujuan pelestarian seperti yang diungkapkan oleh Bapak Budi setyo yaitu:

”Pertama, terjadinya kesinambungan tahapan kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian kegiatan didesa. Kedua, melestarikan fungsi kelembagaan TPK sebagai perwujudan aktivitas fungsi pelestarian kegiatan di masyarakat secara berkelanjutan.” (Wawancara dengan Ketua TPK desa Pandanwangi tanggal 4 Mei 2006).

Langkah selanjutnya adalah pemeliharaan sarana prasarana yang telah dibangun. seperti pernyataan dari Pak Suyono, bahwa :

” Dalam proses pemeliharaan kegiatan PPK kami seluruh warga desa bertanggung jawab memelihara sarana prasarana yang telah dibangun untuk mencegah terjadinya kerusakan, sehingga bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama.” (Wawancara dengan seorang warga Desa Pandanwangi, tanggal 4 Mei 2006).

Kegiatan pemeliharaan bertujuan untuk mempertahankan fungsi pelayanan, memperpanjang umur pemakaian prasarana dan mengurangi biaya yang lebih besar untuk perbaikan kembali bila kondisi prasarana telah rusak.

Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program nasional penanggulangan kemiskinan, salah satu bentuknya adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

PPK merupakan program penanggulangan kemiskinan yang sudah berjalan sejak 1998 hingga sekarang, dimana hasil programnya dapat dirasakan oleh masyarakat golongan miskin. Tahun 2005 Desa Pandanwangi mendapatkan dana

PPK untuk fase III tahun anggaran 2005/2006. Dikatakan oleh Pak Prayitno, bahwa :

”Manfaat yang dapat dilihat dari program ini antara lain adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui bidang pendidikan berupa pembangunan gedung TPQ dan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan.” (Wawancara dengan kepala Desa Pandanwangi, tanggal 2 Mei 2006)

Manfaat PPK dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Pandanwangi seperti yang diungkapkan oleh Bapak Prayitno dapat dilihat dari kegiatan antara lain :

1. Pembangunan fasilitas pendidikan yaitu pembangunan gedung TPQ. Proyek pembangunan ini mendapatkan dana langsung dari PPK dan didukung swadaya masyarakat baik berupa dana maupun tenaga. Dari hasil penelitian alasan pembangunan gedung TPQ ini karena Desa Pandanwangi belum mempunyai tempat yang layak untuk kegiatan belajar mengajar karena sebelumnya menempati sebuah masjid.
2. Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Desa Pandanwangi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan. Kegiatan ini dikhususkan bagi perempuan yang tergabung dalam jamaah tahlil. Dana pinjaman tersebut digunakan untuk tambahan modal usaha bagi anggota tidak boleh digunakan untuk konsumtif.

3. Manfaat yang paling penting dari pelaksanaan PPK sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah adanya perubahan tingkat perekonomian dan taraf hidup masyarakat. (Wawancara dengan Kepala Desa Pandanwangi tanggal 2 Mei 2006).

Keterlibatan masyarakat dalam tiap tahap pelaksanaan PPK dapat menambah kemampuan masyarakat dalam mengelola dan melestarikan hasil-hasil pembangunan, seperti terwujudnya pembangunan gedung TPQ dan kegiatan simpan pinjam yang sekarang masih berjalan.

C. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN PPK DI DESA PANDANWANGI

Berdasarkan penjelasan pada proses pelaksanaan kegiatan PPK yaitu pembangunan gedung TPQ dan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat antara lain :

1. Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan PPK di Desa Pandanwangi seperti yang diungkapkan oleh Pak Budi Setyo selaku Ketua TPK antara lain:

- a) Adanya keikutsertaan masyarakat desa Pandanwangi yang telah memberikan bantuan tenaga dalam mengerjakan pembangunan gedung TPQ.
- b) Dalam pelaksanaan PPK di Desa Pandanwangi didukung pula adanya kerjasama dengan lembaga pemerintah desa yang bisa memfasilitasi kegiatan ini. Dengan kesanggupan dan kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat maka perencanaan, pelaksanaan bahkan sampai dengan pemeliharaan proyek PPK dapat berjalan lancar dan manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat golongan miskin
- c) Adanya kelancaran dalam sistem pengembalian pinjaman untuk kegiatan simpan pinjam dari setiap anggotanya.
- d) Kemudahan dalam memperoleh bahan bangunan seperti batu dan pasir untuk pembangunan gedung TPQ, sebab desa Pandanwangi berdekatan dengan bengawan Solo dan daerah Tuban merupakan daerah pegunungan kapur sehingga mudah untuk mendapatkan bahan bangunan.
- e) Adanya dukungan transparansi dari pihak pelaku PPK dan pemerintah desa dalam setiap kegiatan sehingga pelaksanaan program PPK di Desa Pandanwangi disambut baik oleh masyarakat dalam pembangunan daerahnya.

2. Faktor Penghambat

Keberhasilan pelaksanaan PPK di Desa Pandanwangi bukan tanpa hambatan baik dari masyarakat sendiri maupun dari mekanisme kerja pelaku PPK yang harus dihadapi. Dalam pelaksanaan PPK di Desa Pandanwangi terdapat dua hambatan yaitu:

- a) Dari proses penggalian dana swadaya masyarakat sangat sulit diperoleh sehingga diambilkan dari kas desa.
- b) Dalam proses pencairan dana PPK mengalami keterlambatan hal ini dapat menghambat pelaksanaan PPK di desa Pandanwangi.

D. ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

1. Pelaksanaan PPK di Desa Pandanwangi

a. Persiapan

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan diketahui sasaran program PPK adalah penduduk miskin dengan kriteria jumlah desa tertinggi di kecamatan lebih besar. Pemerintah kabupaten menetapkan prioritas lokasi kecamatan dan selanjutnya mengimplikasikan usulan kepada Propinsi dan Propinsi menyampaikan kepada pemerintah pusat.

Dari hasil penelitian yang didapat dari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban ada sebanyak 12 desa yang memperoleh dana PPK dengan total

biaya / dana sebesar Rp.811.648.000,- Setiap desa memperoleh besar dana yang berbeda-beda sesuai dengan hasil musyawarah yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa dalam persiapan pelaksanaan PPK di Desa Pandanwangi melalui proses sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan dalam forum Musdes I.

Sosialisasi merupakan tahap penting dari pelaksanaan PPK guna mendukung keberhasilan proses dan kegiatan yang dilakukan pada tahap-tahap berikutnya. Hasil Musdes I yang dilakukan Desa Pandanwangi yaitu mensosialisasikan atau mempublikasikan kepada masyarakat tentang informasi pokok PPK yang meliputi : tujuan, prinsip, pendanaan, proses dan prosedur yang dilakukan serta menentukan pelaku-pelaku PPK.

Apabila mengamati proses sosialisasi pelaksanaan PPK di Desa Pandanwangi ini dilaksanakan dengan cukup baik oleh para pelaku PPK. Selain melalui forum dan pertemuan formal kegiatan lain yang dilaksanakan adalah memasang papan informasi tentang PPK yang diletakkan pada tempat-tempat yang sekiranya mudah dilihat oleh masyarakat. Hal ini bertujuan sebagai pendukung sosialisasi dan penerapan prinsip transparansi.

b. Perencanaan

1) Penggalian Gagasan

Penggalian gagasan dilakukan melalui musyawarah kepada kelompok masyarakat dan dusun setelah mendapatkan sosialisasi tentang PPK dari para pelaku PPK. Tahap penggalian gagasan ini digunakan untuk mengetahui program pembangunan apa yang akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari penggalian gagasan diperoleh empat usulan kegiatan pembangunan yaitu pembangunan sarana pendidikan, irigasi, makadam jalan dan simpan pinjam. Kegiatan simpan pinjam ini merupakan aspirasi khusus dari kelompok perempuan sebagai bagian usulan yang diajukan pada Musdes I. Kemudian usulan hasil musyawarah tersebut dilaporkan dalam Musdes ke II.

2) Musdes II dan MAD II

Dari usulan kegiatan Musdes I yang berasal kemudian dikompertisikan untuk mendapatkan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan kriteria dan atauran yang telah disepakati. Pelaksanaan Mudes II berjalan dengan lancar menghasilkan antara lain :

- a. Menetapkan dan mengesahkan usulan kegiatan yang disepakati dan mendapatkan rangking tertinggi dalam Musdes II.
- b. Menetapkan Tim Penulis Usulan yang bertugas menguraikan secara tertulis gagasan setiap kegiatan untuk dikompetisikan kembali pada MAD II.
- c. Disepakati wakil-wakil desa yang akan hadir dalam MAD II.

Kemudian dalam MAD II yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan berhasil menetapkan urutan atau peringkat usulan dari tiap desa sesuai dengan skala prioritas yang telah disepakati. Usulan kegiatan yang telah dibuat peringkatnya dalam MAD II selanjutnya dilakukan pembuatan dan penyempurnaan desain serta RAB diluar kegiatan simpan pinjam.

Dalam proses pembuatan desain dan RAB ini, Tim Penulis Usulan dibantu oleh Fasilitator Kecamatan dengan melibatkan pendamping lokal, Fasilitator Desa, TPK, dan anggota masyarakat kelompok pengusul akan menilai usulan kegiatan yang layak untuk mendapatkan dan PPK kemudian akan dibahas dalam MAD III.

3) MAD III dan Musdes III

MAD III adalah forum ditingkat kecamatan untuk membahas dan menetapkan alokasi dana kegiatan berdasarkan peringkat usulan

kegiatan yang disetujui dalam MAD II, dan pembuatan desain & RAB kegiatannya.

Hasil dari MAD III kemudian dibahas dalam Musdes III. Selanjutnya dalam Musdes III tersebut dialokasikan kembali penetapan alokasi dana bagi desa yang berhak mendapatkan dana PPK, untuk Desa Pandanwangi jenis kegiatan yang mendapatkan dana PPK adalah sarana pendidikan dengan dibangunnya gedung TPQ dan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan. Langkah selanjutnya adalah pembuatan jadwal pelaksanaan kegiatan, pengadaan tenaga kerja dan menetapkan susunan lengkap TPK Desa Pandanwangi.

c. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan MAD III dan Musdes III berdasarkan hasil desain & RAB masing-masing kegiatan. Untuk menjamin kualitas pelaksanaan PPK Desa Pandanwangi tetap mengacu pada prinsip dan azas PPK yang selanjutnya dilakukan proses pencairan dana.

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa sumber pembiayaan PPK tahun anggaran 2005/2006 berasal dari pemerintah (Rupiah murni APBN, Pinjaman Luar Negeri, dan APBD) dan kontribusi dari masyarakat (swadaya masarakat dan swasta). Mekanisme pencairan dan penyaluran

dana PPK mengikuti ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan

Pada prinsipnya dana PPK disalurkan kepada masyarakat melalui rekening kolektif desa yang dikelola melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK) dikecamatan kemudian disalurkan langsung ke desa melalui TPK. Pencairan dana PPK Desa Pandanwangi tahun anggaran 2005/2006 melalui rekening BRI unit Sokosari di Kecamatan Soko selanjutnya diserahkan kepada ketua TPK Desa Pandanwangi secara utuh dengan jumlah sebesar Rp. 82.749.300,- melalui tiga tahap pencairan dana yaitu Tahap I 40%, Tahap II 40%, Tahap III 20%. Dari hasil pengamatan peneliti proses pencairan dana tahap1 mengalami keterlambatan yang akhirnya dapat dicairkan pada akhir bulan Januari 2006.

Dana bantuan PPK dipergunakan untuk membangun proyek yang diprioritaskan oleh masyarakat desa untuk menunjang peningkatan kesejahteraan.

1. Pembangunan Gedung TPQ

Pembangunan gedung TPQ untuk sarana pendidikan Desa Pandanwangi mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat. Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa alokasi dana PPK tahun anggaran 2005/2006 yang diterima oleh Desa Pandanwangi

sebesar Rp.73.249.300,-. Pembangunan sarana pendidikan ini terlaksanakan atas dukungan swadaya masyarakat sebesar Rp.5.000.000,-. Jadi total alokasi dana untuk pembangunan gedung TPQ sebesar Rp.78.249.300,-

Upaya Desa Pandanwangi dalam merealisasikan pembangunan gedung TPQ dilakukan dengan cara gotong royong oleh masyarakat sebab tenaga kerjanya berasal dari masyarakat Desa Pandanwangi sendiri yang berjumlah 150 tenaga kerja.dengan upah Rp.15.000,- per hari. Ukuran bangunan gedung TPQ sudah sesuai dengan rencana yang diusulkan dalam daftar usulan proyek yakni 12.5m x 5m x 3.5m.

Adanya keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan merupakan suatu hal yang sangat positif dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pelaksanaan proyek yang tenaga kerjanya dari masyarakat sendiri dengan cara gotong royong merupakan yang paling tepat dan sesuai dengan tujuan diberikannya bantuan PPK yaitu untuk mendorong, dan memberdayakan sumber daya manusia yang tergolong miskin untuk memperoleh lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan dari data dapat diperoleh gambaran bahwa pembangunan gedung TPQ di Desa Pandanwangi telah berhasil dilaksanakan. Maka dengan dibangunnya gedung TPQ ini dapat dipergunakan untuk proses belajar bagi anak-anak dari Desa Pandanwangi sendiri maupun dari desa lain.

2. Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

Sebagaimana dalam petunjuk operasional pengertian kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan adalah kegiatan kelompok perempuan dipedesaan dalam mengelola modal atau keuangan milik bersama untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat. Kegiatan simpan pinjam Desa Pandanwangi beranggotakan para jamaah tahlil dari kelompok perempuan.

Kelompok simpan pinjam ini mendapatkan dana PPK sebesar Rp.9.500.000,- sedangkan dana swadaya yang berasal dari anggotanya sebesar Rp.221.000,- Jumlah anggota pemanfaat dana simpan pinjam sebanyak 20 orang berdasarkan dari tingkat penghasilan yang tergolong rendah dari masing-masing anggotanya.

Berdasarkan dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa pelaksanaan simpan pinjam kelompok jamaah tahlil "Miftahul Janah"

Desa Pandanwangi berjalan dengan lancar. Pengembalian pinjaman dibayarkan oleh kelompok melalui TPK untuk diteruskan kepada UPK dengan jangka pengembalian selama 12 bulan yang dibayarkan secara rutin para anggotanya setiap bulannya.

Kelancaran pengembalian pinjaman tersebut didukung oleh kesadaran dari para anggotanya akan tanggungjawab mereka untuk mengembalikan pinjaman setiap bulannya dengan harapan pinjaman tersebut benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya.

Dana tersebut digunakan untuk kegiatan perluasan kesempatan dan peluang usaha diharapkan dapat menjadi modal yang mudah dijangkau dan bermanfaat secara berkelanjutan terutama bagi kelompok perempuan dipedesaan.

d. Pemantauan dan Pelaporan Kegiatan PPK

Pemantauan jalannya kegiatan PPK Desa Pandanwangi dilaksanakan oleh FD, FK serta Tim 18 yang beranggotakan masyarakat didalam PPK untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur PPK. Kegiatan pemantauan dimulai dari sebelum kegiatan PPK dilaksanakan sampai dengan kegiatan dilaksanakan. Pemantauan di Desa Pandanwangi sering dilakukan dalam bentuk kunjungan kelapangan,

bertujuan mengadakan cross cek antara laporan tertulis dan keadaan yang berkembang dilapangan. Untuk itu bentuk kunjungan sifatnya ada yang terjadwal dan ada yang bersifat mendadak.

Pelaporan pelaksanaan kegiatan PPK sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban suatu program kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu memperoleh informasi yang lengkap sekaligus dapat mempercepat proses penyampaian data dan informasi dari lapangan atau desa ke tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi dan pusat.. Pelaporan ini dilakukan melalui 2 jalur yakni struktural dan fungsional.

Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Desa Pandanwangi dibuat dan ditandatangani oleh ketua TPK dan FK untuk menyatakan bahwa seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan (kondisi 100%). Hasil pemantauan dan pelaporan dapat dijadikan dasar untuk evaluasi pelaksanaan program didesa maupun kecamatan serta sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahanan mengatasi hambatan yang terjadi.

e. Pelestarian

Sebagaimana dalam petunjuk operasional pelestarian kegiatan merupakan tahapan pasca pelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggungjawab masyarakat. Seluruh hasil kegiatan PPK yang telah

dilaksanakan oleh masyarakat wajib dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses pelestarian kegiatan PPK di Desa Pandanwangi mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat. Untuk memelihara hasil-hasil pembangunan tersebut seluruh masyarakat beserta pelaku PPK dan aparat pemerintah desa berperan aktif dalam memelihara hasil pembangunan sehingga secara terus-menerus dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif dan efisien.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan PPK di Desa Pandanwangi

a. Faktor Pendukung

Pada dasarnya pelaksanaan PPK di Desa Pandanwangi sangat terbuka untuk semua masyarakat. Dalam keberhasilan program ini didukung oleh 5 faktor yaitu adanya partisipasi masyarakat, adanya kerjasama dengan pemerintah desa, kelancaran pengembalian dana simpan pinjam, kemudahan memperoleh bahan bangunan, dan terakhir adanya transparansi dari pelaku PPK. Dari kelima faktor tersebut diharapkan dapat mewujudkan keberhasilan program PPK Desa Pandanwangi.

Adanya partisipasi masyarakat secara aktif terutama keterlibatan dalam mengerjakan pembangunan gedung TPQ. Bantuan tenaga dari

masyarakat membuktikan bahwa sebenarnya masyarakat memiliki kepedulian dan tanggung jawab yang besar dalam mendukung proyek pembangunan didesanya. Disamping itu didukung pula kerjasama dari pihak pemerintah desa dalam memfasilitasi dan memberikan pengarahan mulai tahap perencanaan sampai dengan pelestarian. Sehingga hasil dari proyek PPK dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Desa Pandanwangi khususnya masyarakat miskin.

Untuk kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan pengembalian pinjaman berjalan lancar setiap bulannya karena didasari rasa tanggung jawab setiap anggotanya demi suksesnya kegiatan simpan pinjam. Faktor keempat yaitu letak wilayah desa Pandanwangi yang berada didekat bengawan Solo serta termasuk dalam wilayah pegunungan kapur mempermudah mendapatkan bahan bangunan untuk pembangunan gedung TPQ yang langsung dapat diambil dari daerahnya sendiri, sehingga dapat mengurangi biaya pengeluaran pembelian bahan bangunan.

Pengelolaan seluruh kegiatan PPK Desa Pandanwangi baik kegiatan pembangunan gedung TPQ maupun kegiatan simpan pinjam dilakukan secara transparan (terbuka) oleh pelaku PPK dan aparat pemerintah desa dan diketahui oleh masyarakat luas. Hal ini sangat penting karena dengan

transparansi tersebut maka segala sesuatunya akan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

b. Faktor Penghambat

Dalam kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan selalu ditemui hambatan-hambatan. Hambatan yang timbul sebagai akibat terjadinya ketidak sesuaian antara apa yang seharusnya dilakukan dengan kenyataan yang terjadi.

Bedasarkan data yang diperoleh bahwa permasalahan pertama yang ditemui dalam pelaksanaan PPK Desa Pandanwangi adalah sulitnya memperoleh dana swadaya dari masyarakat desa. Sulitnya mendapatkan dana swadaya masyarakat disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan bantuan untuk kegiatan pembangunan desanya, sehingga dana tersebut diambilkan dari kas desa.

Hambatan kedua yang ditemui yaitu dalam proses pencairan dana PPK tahun anggaran 2005/2006 mengalami keterlambatan. Dimana seharusnya dana dapat dicairkan pad awal bulan Januari 2006 tapi mengalami kemunduran sehingga dapat dicairkan akhir bulan Januari 2006.

Dari kenyataan ini perlu diperhatikan adalah pembinaan dan pemberian informasi yang benar tentang penggunaan dana dan proses pelaksanaan pembangunan yang memerlukan keterlibatan secara aktif dari

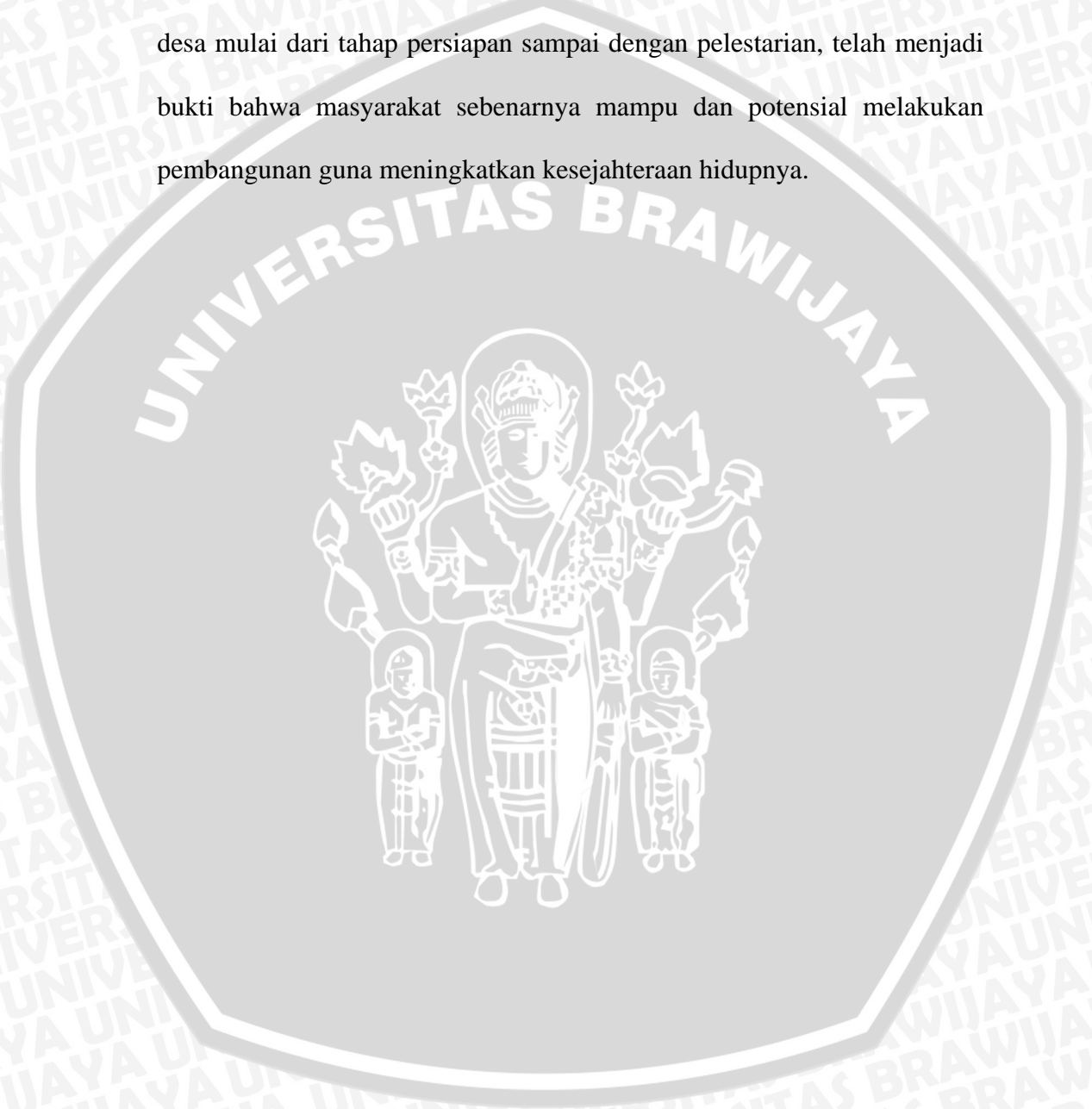
seluruh lapisan masyarakat agar pembangunan dapat berjalan secara efektif.

Selanjutnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan dari dana PPK pada tahun-tahun berikutnya maka dalam pencairan dana perlu memperhatikan faktor penghambat tersebut diatas agar pelaksanaan PPK dapat berguna dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan data hasil penelitian pelaksanaan PPK di Desa Pandanwangi tahun anggaran 2005/2006 bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa agar dapat mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri serta peningkatan penyediaan infrastruktur sosial ekonomi masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran penerima manfaat utama dari PPK adalah kelompok penduduk miskin dipedesaan dengan memperhatikan kelompok perempuan. Pelaksanaan PPK di Desa Pandanwangi telah memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan desa ini. PPK telah memberikan manfaat berupa penyediaan saran dan prasarana pendidikan serta meningkatnya perekonomian masyarakat melalu kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan.

Keberhasilan pelaksanaan PPK di Desa Pandanwangi didukung pula dengan adanya kerjasama serta swadaya dari masyarakat dengan aparat desa mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelestarian, telah menjadi bukti bahwa masyarakat sebenarnya mampu dan potensial melakukan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dapat diambil kesimpulan dan saran-saran yang kiranya bermanfaat dalam usaha meningkatkan kegiatan mekanisme PPK dalam menunjang pembangunan di Desa Pandanwangi.

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan penulis dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program PPK di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban yang dimulai sejak bulan Oktober 2005 sampai dengan Februari 2006 cukup berhasil. Hal ini bisa dilihat dari berhasil dibangunnya sarana pendidikan gedung TPQ yang manfaatnya dirasakan sangat besar bagi masyarakat setempat. Selain itu PPK juga mampu meningkatkan kesejahteraan warga desa Pandanwangi, khususnya kaum perempuan dengan adanya bantuan simpan pinjam kelompok perempuan karena pinjaman ini dapat menambah modal usahanya. jika dilihat dari tujuan dan prinsip PPK yaitu memberdayakan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta adanya keberpihakan pada kelompok perempuan maka program PPK di desa Pandanwangi ini sudah cukup berhasil sebab mulai dari awal tahap kegiatan

yaitu sosialisasi sampai dengan tahap pelestarian, semua warga desa terlibat didalamnya termasuk kelompok perempuan.

2. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program PPK di Desa Pandanwangi adalah adanya kesulitan dalam memperoleh dana swadaya masyarakat sehingga diambilkan dari kas desa. Dan terjadi keterlambatan pencairan dana dari tingkat pusat sehingga pelaksanaannya mengalami kemunduran.

B. SARAN

Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan PPK di Desa Pandanwangi, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam proses pencairan dana untuk lebih ditangani sebab hal tersebut juga untuk kelangsungan pelaksanaan pembangunan. Maka pemerintah desa memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pencairan dana agar tidak terjadi kesalah pahaman bila terjadi keterlambatan pencairan dana kepada masyarakat.
2. Hendaknya pelaku PPK dan pemerintah desa memberikan penjelasan kepada masyarakat dalam penggalian dana swadaya tentang betapa pentingnya sumbangan swadaya dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan pembangunan desanya selain dana pemberian pemerintah.

3. Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih baik maka koordinasi antara dinas atau instansi pelaksana dengan pihak kecamatan, pihak desa dan masyarakat harus lebih ditingkatkan.
4. Terakhir yang harus tetap dijaga dan dikembangkan adalah kerjasama dari masyarakat dan aparat dalam mensukseskan program ini dengan saling bersikap terbuka dan berusaha dengan sebaik-baiknya agar tujuan program ini dan pembangunan pada umumnya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

- Buletin Internal Monitoring Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Edisi 10 Maret 2004.
- Conyers, Diana , 1991, *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga*, Yogyakarta, Gajah Mada Universitas Press.
- Easton. J.W, 1986, *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional dari Konsep ke Aplikasi*, Jakarta, UI Press.
- Handoko, T. Hani, 1984, *Manajemen Edisi 2*, Yogyakarta, BPFE.
- Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 1993 tentang *Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan*.
- Juoro, Umar, 1985, *Masalah Terdepan Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Kaho, Josef Riwu, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press.
- Kansil C.S.T & Cristine S.T. Kansil, 2002, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), 1997, *Pembangunan Nasional*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Miles, M.B & Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Penerjemah: TR Rohidi)*, Jakarta, UI
- Moleong, Lexy. J, 1995, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- , 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Mufidah, 2003, *Paradigma Gender*, Malang, Bayu Media.

Nugroho, D. Riant, 2003, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Gramedia.

Prayitno, Hadi. 1987, *Pembangunan Ekonomi Pedesaan*, Yogyakarta, BPFE

Rumusan Hasil Seminar Nasional Di Lemhanas 29 September S/D 1 Oktober 1998, 1999, *Wawasan Kebangsaan Menuju Indonesia Baru*, Jakarta, Grasindo

Situmorang, Victor M & Cormentya Sitanggang, 1994, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika.

Soejito, Irwan, 1981, *Hubungan Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Bina Aksara

Suparlan, Parsudi, 1984, *Kemiskinan Di Perkotaan*, Jakarta, Sinar Harapan

Suryabrata. S, 1984, *Metode Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Suryono, Agus. 2001, *Teori Dan Isu Pembangunan*, Malang, UM Press.

Syamsi. Ibnu, 1995, *Pengambilan Keputusan Dan Sistem Informasi*, Jakarta, Bumi Aksara.

Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Program Pengembangan Kecamatan, 2002, *Petunjuk Pelaksanaan Bantuan PPK*, Jakarta.

Usaman, H. & Pornomo Setiady Abar, 1996, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara.

Zauhar, Susilo, 1993, *Administrasi Program dan Proyek Pembangunan*, IKIP, Malang.

-----, 1996, *Administrasi Publik*, IKIP, Malang

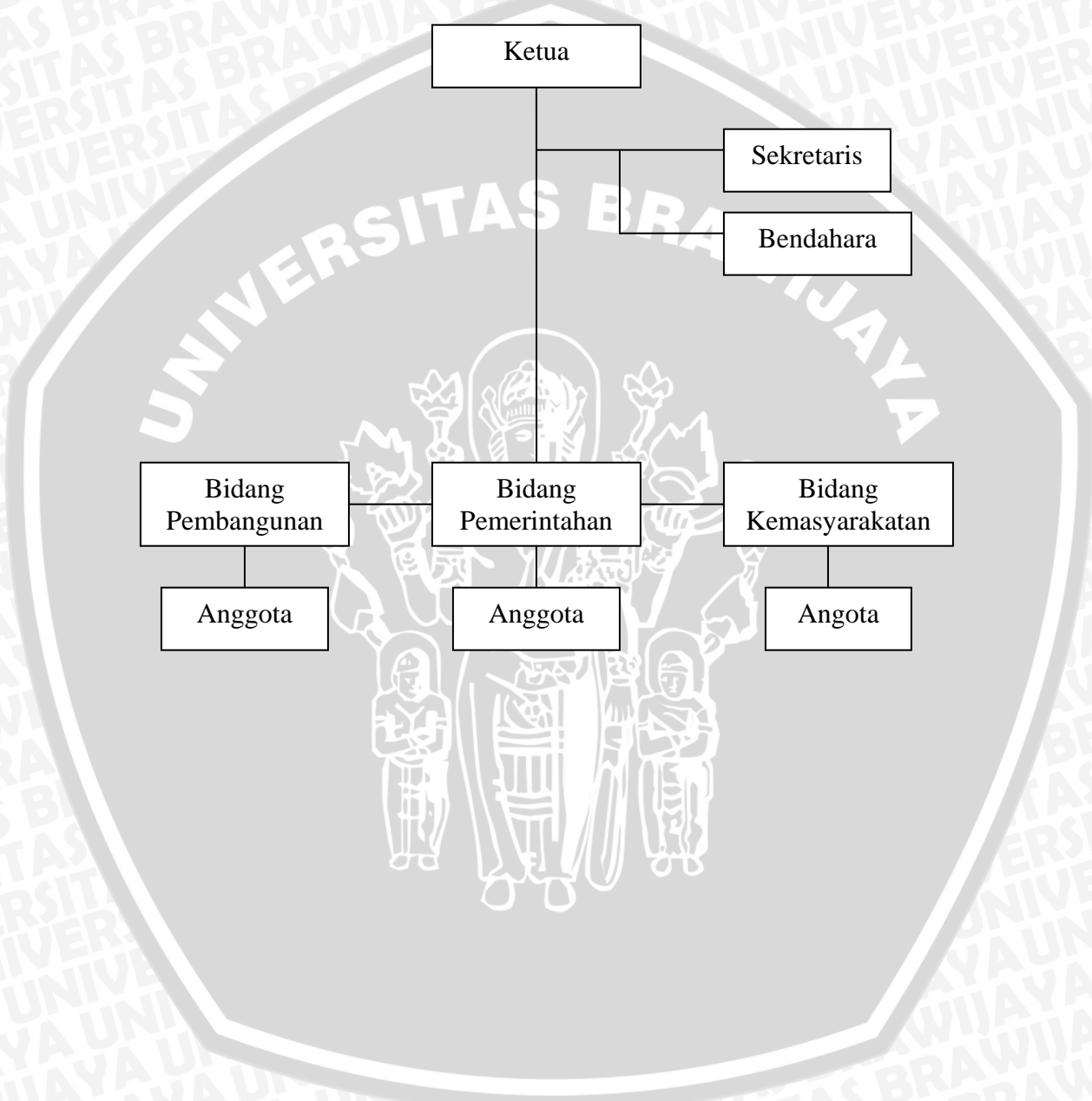
Undang - Undang Dasar 1945

Undang – Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang *Pemerintahan Daerah*

<http://www.google.com> , *tentang Kesejahteraan Masyarakat*, Rabu, 19 April 2006

Lampiran 1

STRUKTUR LPMD DESA PANDANWANGI



Lampiran 2

Struktur BPD Desa Pandanwangi

